

Bank Pembangunan Asia di Timor Lorosa'e

Pada tanggal 23 Juli 2002, Timor Lorosa'e menjadi negara anggota terbaru dari Bank Pembangunan Asia (ADB), yang didirikan pada tahun 1966. ADB adalah agen pinjaman multilateral yang bekerja secara eksklusif di Asia dan Pasifik. Bank ini mencoba mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan untuk memberi sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang di Asia dan Pasifik.

Secara historis ADB telah memfokuskan diri pada pendanaan dan pengimplementasian proyek-proyek infrastruktur berskala besar seperti konstruksi jalan-jalan raya yang besar seperti di Thailand atau proyek-proyek tenaga air di wilayah sungai Mekong. Namun demikian, pada tahun 1999, sebagai jawaban atas tekanan dari negara-negara pemberi dana, ADB membuat perubahan terhadap fokusnya pada proyek "pengentasan kemiskinan". Pada saat ini, semua tujuan dan pelaksanaannya ditujukan pada "pencapaian dengan target pembangunan yang lebih efektif dalam program pengentasan kemiskinan". Hal yang tercakup didalamnya adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal, pembangunan sosial serta pemerintahan yang bersih.

ADB, Dana Monetary Internasional (IMF) dan Bank Dunia sama-sama memberi dukungan terhadap liberalisasi dan diregulasi ekonomi serta mempromosikan diperluasnya sektor swasta. Semua negara anggota ADB juga adalah anggota-anggota IMF dan Bank Dunia. Di Timor Lorosa'e ADB mempunyai Memorandum Bersama dengan Bank Dunia dan mereka sama-sama mengelola Dana Bantuan Hibah "Trust Fund" untuk Timor Lorosa'e (TFET). Keterlibatan ADB mulai sejak tahun 1999.

Saat ini ADB mempunyai 61 anggota peserta, 44 anggota dari Asia dan 17 diantaranya dari Eropa dan Amerika Utara. Beberapa diantara anggota peserta tersebut, ada anggota yang menerima pelayanan dari ADB dan ada anggota yang lain tidak menerimanya. Para penerima dana bantuan kebanyakan dari negara-negara yang sedang berkembang rata-rata berasal dari wilayah Asia/Pasifik.

Setiap negara anggota memberi kontribusi mereka berdasarkan tingkat kesejahteraan negaranya dan selanjutnya dapat menjadi pemegang saham. Mereka duduk didalam Dewan eksekutif, yang merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi dalam ADB. Dewan eksekutif memilih 12 anggota Dewan Direksi yang mana delapan diantaranya berasal dari regional sedangkan empat lainnya non-regional.

Jumlah sumbangan negara anggota menentukan jumlah suara dalam pemilihan juga dalam tingkat perwakilan dewan direksi (lih. Grafik). Negara-negara terkuat, seperti Jepang, Cina dan Amerika Serikat memberi sumbangan uang yang cukup banyak dengan demikian bisa menentukan direktornya sendiri. Negara anggota yang lain, selain tiga negara di atas membentuk dewan bersama dan memilih satu perwakilan untuk duduk di dalam dewan anggota. Jepang sama seperti Amerika Serikat juga mempunyai saham sebesar 15,9%, yang mana dapat memberikan jumlah suara sebesar 13,1% kepada Direktornya. Sedangkan sumbangan finansial untuk Timor Lorosa'e berjumlah sebesar 0,01% dan ini hanya bisa memiliki 0,3% dari jumlah keseluruhan pemilihan. Sekarang ini, Timor Lorosa'e tidak terwakili dalam Dewan Direksi, walaupun hal persoalan ini akan dinegosiasi dengan negara-negara peserta anggota lainnya yang telah mendirikan dewan bersama.

Jumlah anggota dari tiap negara anggota ditentukan dengan cara yang sama persis seperti penentuan hak suara. Ini artinya bahwa orang dari Jepang dan Amerika Serikat lebih banyak dari seperempat dari staf profesional ABD termasuk didalamnya adalah menjabat jabatan-jabatan penting. Semenjak didirikannya ADB hingga sekarang, jabatan presiden selalu dijabat oleh orang-orang Jepang yang jabatan sebelumnya adalah menteri Keuangan Jepang. Jabatan-

(Bersambung ke halaman 2)



Daftar isi . . .

Proyek Pembangunan Mikro Keuangan	6
Bank Pembangunan Asia dan Privatisasi	10
Konferensi Internasional Pembangunan Kembali Paska Konflik	12
Pendidikan Tinggi di Timor Lorosa'e	14
Berita Singkat	19
Editorial: Jangan Perang Melawan Iraq!	20

jabatan kunci lainnya yang dijabat oleh Jepang termasuk diantaranya adalah direktur Perencanaan strategis, bagian anggaran, personalia dan program. Amerika Serikat juga memegang posisi-posisi senior dan secara tradisi menduduki jabatan sebagai Penasehat Umum. Saat ini ada empat orang Timor Lorosa'e yang bekerja di kantor khusus ABD di Timor Lorosa'e.

ABD menyediakan uang pinjaman dan pelayanan teknis kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta dalam rangka membimbing negara-negara anggotanya. ADB memiliki empat sumber uang yang berbeda. Yang paling besar adalah Sumber Modal Luar Biasa/MLB ADB. Yang lainnya adalah DPA/Dana Pembangunan Asia, Dana Khusus Bantuan Teknik atau DKBT, Dana Khusus Jepang/DKJ dan Dana Jepang untuk Pengentasan Kemiskinan/DJPK.

Modal Luar Biasa terdiri dari sumbangan-sumbangan yang berasal dari negara-negara peserta anggota, uang cadangan dan uang yang dipinjam dari pasar-pasar modal. Uang pinjaman dari Modal Luar Biasa tercakup didalamnya 80% dari keseluruhan pinjaman dan dialokasikan kepada negara-negara yang memiliki perencanaan pembangun di berbagai sektor, yang tentunya lebih berkemampuan membayar kembali hutang itu. Pinjaman-pinjaman tersebut semuanya non-konsesional: tarif suku bunga utama dibebani (lebih dari 5% per tahun) dan dibayar kembali selama 15-25 tahun, tetapi mereka tidak selalu mengikuti syarat-syarat dari ADB.

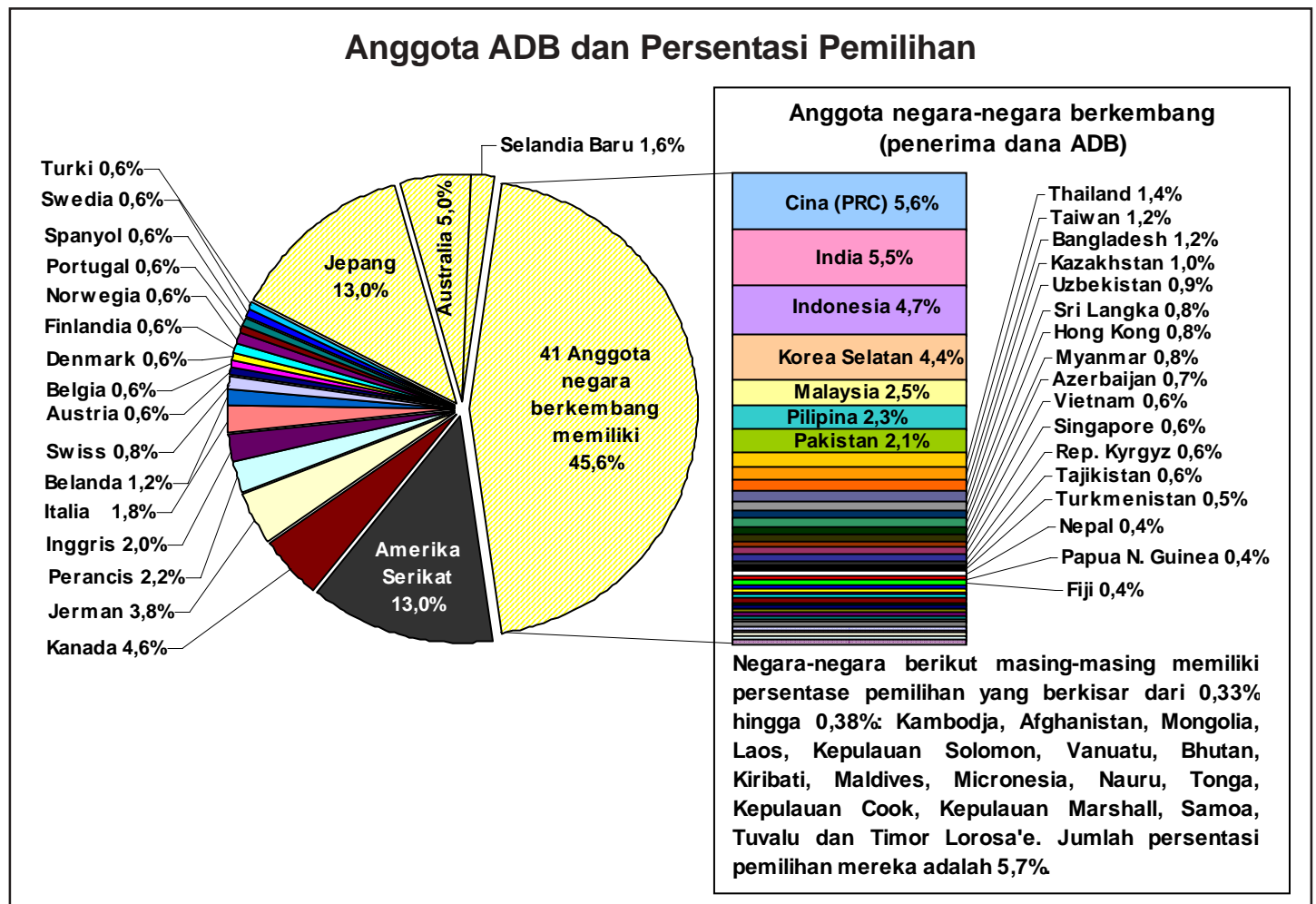
Dana Pembangunan Asia atau DPA berasal dari dana-dana bantuan negara anggota yang disumbangkannya dalam setiap tiga tahun. Pemberi dana-dana terbesar adalah Jepang dan Amerika Serikat. Pinjaman-pinjaman yang berasal dari DPA

disumbangkan untuk negara-negara anggota yang termiskin yang ditentukan oleh ADB sebagai negara-negara yang mempunyai "kemampuan rendah untuk membayar kembali hutang". Pinjaman-pinjaman ini bisa jadi konsesional; bila suku bunga sangat rendah dan ada kelonggaran waktu delapan tahun termasuk didalamnya jangka waktu keseluruhan pembayaran 32 tahun. Namun demikian ADB dapat saja menekan syarat-syaratnya. Misalnya, pinjaman bisa diberi secara angsuran dan tiap angsuran tergantung pada perubahan-perubahan kebijakan, atau pada legislasi tertentu yang diajukan. Ketentuan-ketentuan ini bisa mempromosikan reformasi dan privatisasi di sektor-sektor seperti produksi energi, Transportasi, Komunikasi dan Industri. Misalnya pada tahun 2000 di Filipina, sebuah pinjaman ADB dikondisikan untuk reformasi dan privatisasi Perusahaan Energi Nasional.

Dana Khusus Bantuan Teknis/DKBT dihimpun dari sumbangan yang berasal dari negara-negara anggota dan surplus dari bunga yang dibayar untuk sumber modal luar biasa ADB. DKBT digunakan untuk mendanai Pelayanan Teknis yang disediakan oleh ADB supaya mendukung proyek-proyeknya. Pembayaran Pelayanan Teknis juga biasanya dalam team khusus yang terdiri dari konsultan-konsultan asing, yang biasanya berasal dari negara-negara maju.

DKJ dan DJPK adalah dana terpisah untuk pelayanan teknis yang disediakan oleh Jepang. Semua pengeluaran dari DKJ harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Jepang. Sebenarnya dana itu adalah pengembangan bantuan bilateral Jepang.

Anggota ADB dan Persentasi Pemilihan

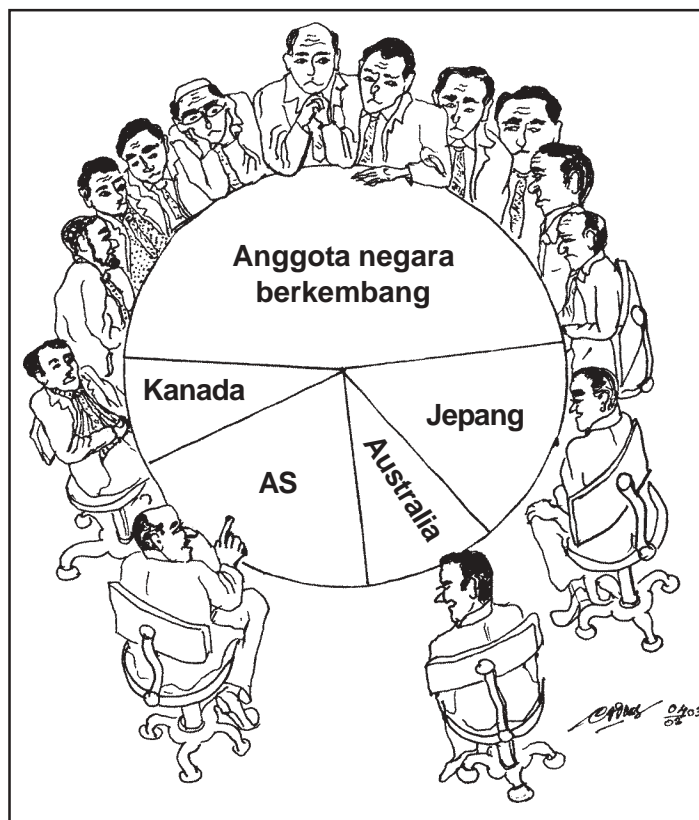


Promosi ABD tentang infrastruktur yang berskala besar telah memberikan dampak positif bagi negara-negara anggota berkembang dan juga orang-orang yang menggunakan jasa-saja itu. Proyek-proyek infrastruktur berskala besar memiliki biaya cukup besar yang bisa dimobilisasi oleh pemerintah negara-negara anggota berkembang dan danatur internasional. ADB telah memprakarsai program yang dinamakan Pola Pengembangan Transfer Sendiri dimana pemerintah negara anggota berkembang membuat kontrak dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk mendanai, membangun dan memanfaatkan sumber daya seperti pusat pembangkit listrik dengan batas waktu yang biasanya berkisar antara 25 hingga 50 tahun. Lazimnya perusahaan-perusahaan asing yang memperoleh semua keuntungan dari jangka waktu yang telah disepakati dan selanjutnya mentransfer hak kepemilikan atas sumber daya tersebut kepada pemerintah negara anggota yang sedang berkembang.

Para negara anggota penerima dana bantuan juga harus memberi sumbangan dengan menyediakan modal ataupun hak pengelolaan sumber daya alam. Biasanya ADB memberi pinjaman dana kepada proyek-proyek melalui pinjaman-pinjaman non-konsesional dan memfasilitasi satu rancangan kerja sama dengan sektor swasta, lokal maupun perusahaan-perusahaan multinasional agar bersama-sama mendanai proyek yang bersangkutan.

Supaya dapat memberdayakan keterlibatan swasta dalam proyek-proyek tertentu maka ADB menawarkan persyaratan-persyaratan yang memperkecil risiko untuk para investor swasta. Contoh, seperti jaminan “pengambilan atau pembayaran” yang mana agen pemerintah anggota negara sedang berkembang sepakat untuk memperoleh sejumlah output tertentu, seperti air bersih atau listrik, dengan harga yang telah ditetapkan. Para investor swasta seringkali mendesak dengan harga-harga yang tinggi terhadap output agar supaya bisa menutupi investasi-investasi mereka secepat mungkin.

Hal semacam ini telah memberikan dampak yang serius. Pada awal tahun 1990an, Badan Energi Nasional Filipina memberikan jaminan pembayaran dengan dolar AS kepada para produsen listrik independen dalam Pola Pengembangan Pelaksanaan Transfer. Pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan nilai mata uang peso terhadap dolar, maka Badan Energi Nasional pemerintah harus membayar perbedaan tersebut. Selanjutnya makin berkurang tenaga listrik yang dibutuhkan oleh karena krisis ekonomi tersebut, namun demikian Badan Energi Nasional masih tetap harus membeli



jumlah yang telah disepakati itu.

Pada tahun 1997, ADB memprakarsai konstruksi penyediaan Air Bersih Thu Duc dikota Ho Chi Minh, Vietnam, melalui Kerangka Pengembangan Transfer Sendiri. Para investor tersebut meminta jaminan “penerimaan atau pembayaran” dan memperbaiki harga air bersih dalam kontrak mereka selama 25 tahun. Hal ini menyebabkan tingginya harga air bersih untuk masyarakat dikota Ho Chi Minh, dan pemerintah yang memiliki penyediaan air bersih harus mencari pembeli agar membeli air bersih yang telah disepakati dalam kontrak untuk jual-beli air.

Strategi-strategi ADB yang terbaru mengenai “pengentasan

kemiskinan” kurang terfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar tetapi lebih terfokus pada peningkatan pelayanan-pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, peningkatan lingkungan hidup) dan pembangunan pertanian pedesaan dan kota. Namun demikian, hal ini merupakan sektor-sektor yang baru bagi ADB dan proyek-proyeknya, serta mencapai kemajuan yang sangat sedikit dalam area ini. Selanjutnya pada tahun 2000, dalam draft laporan Dana Bantuan Pembangunan Asia untuk para pemberi dana bantuan yang dilaporkan bahwa “hanya ada sedikit proyek yang didesain secara khusus” bagi tujuan pengentasan kemiskinan

ADB beroperasi di Asia, tetapi keanggotaannya dikembangkan menjadi sebuah institusi global. Karena itu, ADB mempunyai kantor seperti di Frankfurt, Jerman dan di Washington, Amerika Serikat. Prioritas-prioritasnya lebih ditekankan pada kepentingan para pemegang saham terbesar daripada peserta negara-negara anggotanya yang sedang berkembang yang mempunyai hak-hak suara sangat kecil dan perwakilan staf yang kurang baik.

ADB di Timor Lorosa'e

Sesudah referendum tahun 1999, sumbangan-sumbangan pribadi dari pemerintah berbagai negara membentuk Dana Hibah untuk Timor Lorosa'e atau TFET (Trust Fund for East Timor), dimana Bank Dunia bertindak sebagai pengawas utama. Dana Hibah tersebut dikelola bersama antara Bank Dunia dengan ADB: ADB memegang bidang infrastruktur, air bersih dan sanitasi serta mikro keuangan, sementara itu Bank Dunia mengelola proyek-proyek TFET yang lain, seperti bidang pertanian, pengembangan sektor swasta, dan pemberdayaan komunitas. Tabel pada halaman berikut memberi tinjauan singkat mengenai bagaimana ADB mengelolah proyek-proyek TFET, dan artikel yang ada pada halaman 6 menganalisa proyek mikro keuangan secara terperinci.

Sebagai tambahan bagi proyek-proyek TFET, ADB telah menyediakan Pelayanan Teknis atau PT selama tiga tahun dari dananya sendiri, dengan jumlah sekitar \$8,6 juta AS. Pelayanan Teknis biasanya melengkapi proyek-proyek TFET, tetapi ada beberapa yang mencakup perencanaan menyeluruh dan pengembangan kemampuan.

Kebanyakan dana TFET, yang diberikan oleh para donatur untuk membantu masyarakat Timor Lorosa'e habis ditangan perusahaan-perusahaan dan konsultan-konsultan asing yang sangat mahal. Misalnya, hingga bulan Januari 2003 lebih dari 30% dari dana-dana itu distribusikan untuk Proyek Rehabilitasi Infrastruktur Darurat ADB 1 dan lebih dari 40% untuk proyek Rehabilitasi Air Bersih dan Sanitasi 2, dan dana-dana tersebut masuk dalam kantong para konsultan asing. Kenyataannya, lebih dari 80% dari dana-dana proyek rehabilitasi air bersih dan sanitasi 2 dikontrakan kepada para konsultan asing, perusahaan-perusahaan dan NGO-NGO internasional.

Sudah jelas bahwa perusahaan-perusahaan milik orang Timor Lorosa'e tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri proyek-proyek tersebut. Jika tidak ADB harus mengembangkan usaha bersama 'joint venture' dan alternatif yang lain agar dana-dana ini beredar di dalam negara ini.

Karena dana-dana hibah atau TFET disumbangkan untuk orang Timor Lorosa'e maka upaya-upaya yang dilakukan

harus menjamin bahwa proyek-proyek itu dilaksanakan sesuai keinginan masyarakat Timor Lorosa'e, tetapi mengikuti kehendak para konsultan asing. Proyek-proyek ini harus dibawah kontrol masyarakat Timor Lorosa'e, dan bukan dibiarkan saja kepada sektor swasta dibawah "Membangun Mengoperasikan dan Mentransfer" atau pola-pola lain yang diorientasikan pada privatisasi (lih. Artikel hal. 10).

Dana-dana hibah/TFET dan dana-dana pelayanan teknis adalah dana hibah yang tidak akan dibayar kembali, tetapi kemungkinan ADB akan menganjurkan pinjaman dimasa mendatang seperti yang mereka lakukan di negara-negara lain. Hingga sekarang pemerintah Timor Lorosa'e tetap mempertahankan kebijakannya untuk tidak berhutang dan tidak meminjam uang dari ADB ataupun dari tempat-tempat lain. Namun pemerintah Timor Lorosa'e harus lebih waspada dengan usulan-usulan yang akan datang yang bisa menuntun rancangan pinjaman dengan Bank Dunia. Pinjaman-pinjaman semacam itu sering kali memberikan dampak yang buruk. Lagi pula bukti-bukti dimasa silam telah memperlihatkan bahwa sangat sulit untuk membayar kembali pinjaman-pinjaman seperti dari keuntungan-keuntungan proyek, dan pembayaran kembali harus dilakukan dengan dana-dana dari anggaran pembangunan, dan seringkali dengan pengeluaran yang sangat besar. ❖

Proyek-proyek ADB dibawah TFET

Proyek Rehabilitasi Infrastruktur Darurat 1 (EIRP1)

Masa waktu proyek:
April 2000-Mei 2002
(diperpanjang hingga Juni 2003)

Dana yang dialokasikan:
\$29,8 juta

Jumlah pengeluaran:
\$26,3 juta

Program Darurat Rehabilitasi Infrastruktur atau PDRI yang pertama ditujukan pada perbaikan darurat jalan-jalan utama diseluruh negeri ini, rehabilitasi pelabuhan Dili, dan menginstalasi kembali tenaga listrik. Prioritasnya diarahkan pada kebutuhan-kebutuhan darurat untuk membangun kembali pengrusakan infrastruktur setelah tahun 1999, proyek-proyek itu dilaksanakan berdasarkan sistem penggunaan pada masa pendudukan Indonesia dari pada menghabiskan waktu untuk mempelajari sistim-sistim yang berkelanjutan. Menginstalasi kembali listrik difokuskan pada pusat-pusat listrik di daerah-daerah juga diantaranya beberapa bantuan untuk pusat listrik Comoro Dili dan pengembangan penggunaan listrik (EDTL) serta manajemen keuangan. Pekerjaan ini berjalan lebih lamban dibandingkan dengan pekerjaan rehabilitasi jalan dan pelabuhan yang telah diselesaikan pada pertengahan tahun 2002. Ada kesepakatan umum yang mengatakan bahwa adanya persoalan-persoalan serius yang terjadi dengan pembagian dan pengelolaan listrik. Walaupun lembaga-lembaga lain terlibat dalam pengembangan listrik juga bertanggungjawab atas persoalan-persoalan ini, terlebih UNDP, UNOPS pemerintah Portugis dan Jepang (lih. *Buletin LH* Vol. 3 No. 6 dan Vol. 3 No. 8), ADB adalah lembaga yang paling berperan dalam keseluruhan koordinasi. Menurut ADB, mereka telah mempunyai "hasil acakan" pada sektor kelistrikan, dan "pelayanan-pelayanan konsultatif telah dievaluasi oleh staf ADB karena ketidakpuasan itu".

Proyek Rehabilitasi Infrastruktur Darurat 2 (EIRP2)

Masa waktu proyek:
Mei 2002-Desember 2003

Dana yang dialokasikan:
\$9,0 juta

Jumlah pengeluaran: 0

Kelanjutan dari Program Darurat Rehabilitasi Infrastruktur yang pertama diarahkan pada pembangunan jalan-jalan raya berkelanjutan dengan mengurangi kebutuhan rehabilitasi darurat tahunan dan mendirikan resim pemeliharaan jalan raya. Proyek ini meliputi pelayanan-pelayanan teknis dan pengelolaan manajemen serta pelatihan.

Proyek Rehabilitasi Air Bersih dan Sanitasi 1 (WSSRP1)

Masa waktu proyek:
Agustus 2000-Desember 2001

Dana yang dialokasikan:
\$4,5 juta

Jumlah pengeluaran:
semua

Proyek ini terdiri atas fasilitas reaksi cepat untuk mendukung rehabilitasi darurat dan merehabilitasi sistem pengadaan air bersih dan sanitasi untuk Dili dan 13 kabupaten. Proyek ini juga difokuskan pada pengembangan sektor perencanaan, pengelolaan sanitasi dan air bersih dibawah otoritas ETTA. Proyek Ini meliputi peningkatan kapasitas dan pengembangan institusi untuk mempersiapkan kebijakan, perundang-undangan serta kerangka-kerangka regulasi dan norma-norma serta panduan untuk departamen.

Proyek Rehabilitasi Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi 2 (WSSRP 2)

Masa waktu proyek:
Agustus 2001-April 2003

Dana yang dialokasikan:
\$4,5 juta

Jumlah pengeluaran:
\$1,7 juta

Pada umumnya proyek-proyek ini hanya melanjutkan kegiatan-kegiatan Proyek Rehabilitasi pengadaan Air Bersih dan Sanitasi 1, dengan penekanan tambahan pada peningkatan teknologi dan telekomunikasi, sanitasi kota dan sistem pengimplimentasian tarif. Sistem Pengadaan air bersih yang sedang dikembangkan adalah sistem pelayanan kota yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pelayanan-pelayanan desa yang dilaksanakan oleh masyarakat, dengan NGO-NGO biasanya dikontrak untuk mengembangkan sistem-sistem pedesaan. Walaupun dana-dana publik dari TFET sedang digunakan untuk membiayai usaha-usaha ADB untuk membangun kembali infrastruktur publik seperti Pengadaan air bersih dan listrik, institusi ini seringkali menganjurkan pelayanan-pelayanan publik ini dibawah kontrol swasta melalui pola-pola privatisasi (lih. Artikel, hal. 10).

Proyek Rehabilitasi Fasilitas Dermaga Penangkapan Ikan di Hera

Masa waktu proyek:
November 2001-Maret 2003

Dana yang dialokasikan:
\$1 juta

Jumlah pengeluaran:
\$0,6 juta

Keterlibatan ADB dengan Dermaga Hera (dibagian timur dari Dili) dilaksanakan sejak pendudukan Indonesia, dengan pinjaman dana yang diberikan kepada pemerintah Indonesia sebesar \$50 juta pada tahun 1984 untuk proyek infrastruktur perikanan berskala besar yang telah selesai pada tahun 1994. ADB mengakui bahwa proyek pembangunan dermaga Hera tidak baik karena itu dermaga ini perlu dibangun kembali. Dalam laporan ADB tahun 1997 terlihat bahwa Proyek Infrastruktur Perikanan lebih ditafsirkan pada pertumbuhan sektor swasta yang bisa terlihat melalui perbaikan fasilitas-fasilitas dermaga, yang sesungguhnya sangat sedikit menciptakan peluang kerja ataupun meningkatkan penyediaan dan kualitas ikan. Proyek tersebut juga nampaknya merusak pesisir pantai dan lingkungan laut.

Proyek Rehabilitasi Fasilitas Dermaga Perikanan Hera yang sekarang sama seperti proyek terhulu walaupun proyeknya berskala kecil. Proyek ini sesungguhnya adalah sub-komponen dari proyek TFET yang dikelola oleh Bank Dunia dan Proyek Rehabilitasi Pertanian tahap II, tetapi karena proyek ini berkaitan dengan infrastruktur maka ADB yang melaksanakan proyek tersebut. Sasaran pembangunan pelabuhan Hera adalah sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal perikanan lepas pantai, dan fokus proyeknya adalah untuk memperbaiki kembali dan memperkuat struktur pelabuhan seperti struktur-struktur tembok laut dan dermaga-dermaga. Walaupun ADB hanya memperkirakan 24 jenis kapal yang bisa berlabuh di pelabuhan yang satu-satu sedang direhabilitasi di negeri ini, namun diperkirakan bahwa pelabuhan yang lainnya akan dibangun oleh sektor-sektor swasta jika fasilitas yang baik telah tersedia. Meskipun ADB mengakui bahwa orang-orang Timor Lorosa'e relatif tertinggal dalam aspek perikanan yang hanya bisa menangkap ikan di tepi laut, tetapi mereka beranggapan bahwa penangkapan ikan di laut lepas hasilnya retif baik akan mengurangi penangkapan ikan di tepi pantai serta menyediakan ikan yang lebih banyak untuk masyarakat umum. Anggapan ini hanya mungkin bisa benar jikalau ikan ini tidak bisa dijual dengan lebih menguntungkan pasar asing.

Proyek Pembangunan Mikro Keuangan

Masa waktu proyek: Desember 2000-Desember 2003

Dana yang dialokasikan: \$4 juta

Jumlah pengeluaran: \$2,8 juta

Lih. Artikel, hal. 6

Proyek Pembangunan Mikro Keuangan

Bank Pembangunan Asia bertanggungjawab atas pengelolaan Proyek Pembangunan Mikro Keuangan yang didanai oleh Dana Hibah (Trust Fund) untuk Timor Lorosa'e (TFET). Tujuan proyek ini adalah untuk menyediakan kredit dan memberi pelayanan-pelayanan uang tabungan di Timor Lorosa'e. Ada dua komponen dan proyek antara lain rehabilitasi serikat kredit dan penciptaan bank mikro keuangan.

Serikat Kredit adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang mereka secara bersama dan memberi pinjaman. Dan ADB menyediakan pelatihan dan dukungan finansial untuk merehabilitasi serikat kredit perorangan dan Federasi Serikat Kredit. Selain itu, juga mengadakan subsidi-subsidi administratif yang telah diperkecil dengan demikian serikat kredit dapat menutupi biaya-biaya administratif mereka sendiri. Pada saat sekarang ada 16 klien serikat kredit yang secara predominan menabung sejumlah uang.

Pada mulanya para pemberi bantuan dana menjanjikan \$7,72 juta AS kepada Proyek Pembangunan Mikro Keuangan, tetapi proyek tersebut terlambat hingga UNTAET mengeluarkan legislasi untuk kegiatan-kegiatan perbankan pada bulan Desember 2001. Akhirnya hanya \$4 juta AS yang diberikan kepada proyek tersebut dan \$2 juta AS diserahkan kepada Institut Mikro Keuangan Timor Lorosa'e (MFIET), yakni sejumlah modal terendah untuk mendaftarkan sebuah Bank di Timor Lorosa'e.

Untuk mendaftarkan sebuah Bank dengan Kewenangan dan Pembayaran Perbankan, sebuah Bank harus mempunyai pemilik yang jelas. ADB menciptakan Lembaga untuk Pengentasan Kemiskinan di Timor Lorosa'e agar bisa menerima dana dan menjadi pemilik sementara dari MFIET.

ADB merancang sebuah Unit Proyek Manajemen untuk mengelola dana TFET atas nama ADB dan Bank Dunia. Unit Proyek Manajemen melakukan semua rancangan, pengembangan, perekrutan, pelatihan maupun mengelola tugas-tugas daripada MFIET. Pada awalnya Unit Manajemen Proyek terdiri dari lima orang asing dan lima orang Timor, tetapi sekarang hanya satu orang konsultan asing dan dua orang konsultan Timor Lorosa'e.

Lembaga untuk Pengentasan Kemiskinan dipimpin oleh Dewan Pengawas Dana Hibah. Anggota-anggota peserta yang ada didalamnya adalah Wakil ADB di Timor Lorosa'e yang juga adalah ketua, Kepala dari Kantor Cabang Khusus ADB (anggota ex-officio) dan juga wakil peserta dari AusAID maupun Agen Bantuan Pembangunan Portugis. Adapun dua peserta anggota Timor, yang salah satu wakilnya dari sektor swasta Timor dan salah seorang peserta lainnya adalah wakil dari pemerintah. Penyokong dana ADB dari masyarakat lokal dibawah kontrol Dewan Pengawas Dana Hibah untuk menjamin MFIET tetap "berjanji atas tujuan-tujuan pokoknya" dan untuk "melawan tekanan-tekanan politik". Atas permintaan-permintaan dari pemimpin Timor Lorosa'e, maka dua orang Timor Lorosa'e dimasukkan dalam Dewan tetapi jumlah terbesarnya adalah orang-orang asing.

Dewan Penyantun mengangkat Dewan Direksi yang secara resmi memimpin MFIET. Pada saat ini Dewan Direksi kedudukannya sama seperti Dewan Penyantun, dengan bertambahnya Kepala Unit Manajemen Proyek dan Administratif serta Pejabat Keuangan pada kantor ADB di Timor

Lorosa'e. Dewan Direksi tidak berdiri secara independen, dan semua tugas yang diembankan kepada Dewan Direksi dilaksanakan oleh Unit Manajemen Proyek. Lih. diagram pada halaman berikut untuk struktur manajemen.

Pada bulan Desember 2003 Lembaga untuk Pengentasan Kemiskinan dan MFIET akan dialihkan ke tangan orang-orang Timor Lorosa'e dan proses yang digambarkan ADB rupanya sama seperti "swatanisasi". Dewan Penyantun dan para Direktur yang ada sekarang akan diganti dan Unit Manajemen Proyek akan dibubarkan. Dewan Penyantun baru akan menunjuk Dewan Direksi baru, yang akan menerima tanggungjawab seluruh tugas manajemen MFIET.

Bagaimana proses perwujudan selanjutnya masih akan diputuskan. Baik ADB, Wakil Khusus di Timor Lorosa'e maupun kepala Unit Manajemen Proyek memberikan informasi yang tepat kepada *La'o Hamutuk* tentang masa depan MFIET. Namun yang jelas, tujuan utamanya adalah memprivatisasi. Pemilik saham akan mentransfer kepada pemerintah Timor Lorosa'e yang kelak menjalankan fungsi-fungsi lembaga yang bersangkutan serta menunjuk Dewan Direksi. Akan tetapi, baik IMF, Bank Dunia maupun ADB sangat menentang pemerintah untuk memiliki sebuah Bank. Proses swastanisasi akan menjadi tunduk pada keinginan donor oleh pelayanan dana teknis ADB selanjutnya dalam tahun ini.

Pada tanggal 4 Desember 2002 ketika para pelajar melancarkan protes atas penangkapan terhadap siswa yang menjadi sengit, gedung MFIET yang ada disamping Pasar Comoro dijarah tapi tidak dibakar. Hal ini terjadi karena diduga ada keterkaitannya dengan Perdana Menteri. Dalam serangan tersebut peralatan komputer dan perabotan kantor dikeluarkan dari dalam bangunan dan dibakar di jalan raya. MFIET kemudian pindah tempat ke sebuah kantor sementara. Dan harus menggantikan semua perabotan dan semua peralatan komputer serta sekarang secara tetap berpindah tempat ke Sebastião da Costa dekat dengan pasar tenunan (tais). MFIET mengharap dikasih oleh pemerintah tempat baru untuk kantornya Dili dan pusat MFIET.

Namun begitu dana pengeluaran sebesar \$2 juta AS tertanggal 18 Januari 2002, kantor pusat MFIET dan Cabang Pusat di Dili belum dibuka hingga tanggal 13 Mei 2002. Dua Cabang di distrik Gleno dan Maliana sudah dibuka sejak bulan September dan November. Sudah sebanyak 1.533 peminjam uang dan telah dibagikan sebesar \$236.800 AS dari \$2 juta AS dari modal pinjaman awal.

Pelayanan-pelayanan Pinjaman

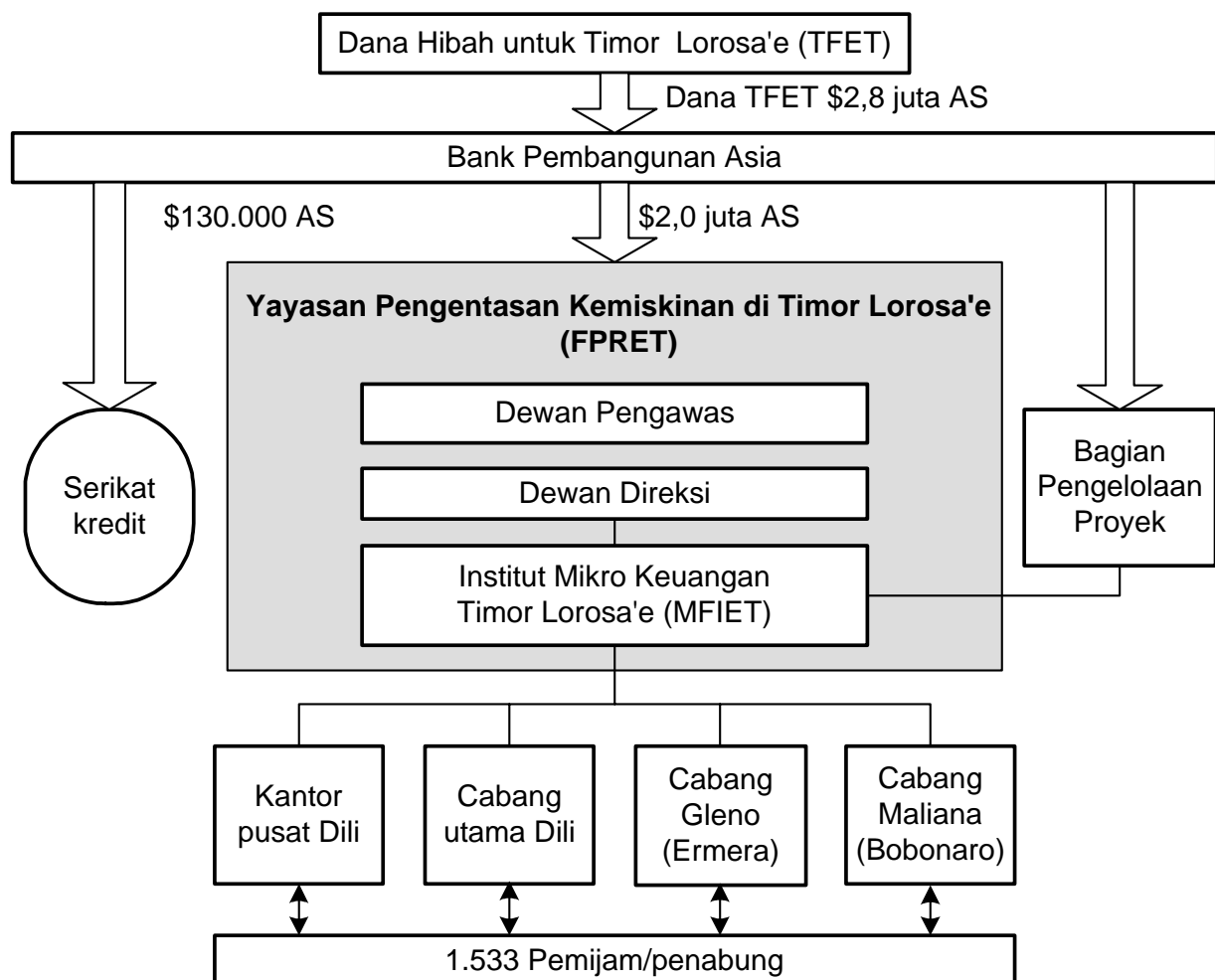
MFIET menyediakan pelayanan-pelayanan simpan-pinjam. Fokusnya adalah bahwa dengan mengadakan pinjaman: pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan tabungan tidak dipublikasi karena ketidak-mampuan MFIET dalam mengantisipasi sejumlah besar klien yang ingin melakukan deposit-deposit. Semua orang yang meminjam uang memiliki sebuah pelayanan akuntan, yang ada secara bersamaan dengan pinjaman. Pelayanan akuntan tersebut adalah untuk mengawasi pembayaran kembali utang-utang. Buku-buku akuntan tabungan tersedia untuk umum, dengan penawaran bunga jikalau lebih dari \$50 yang ditabung.

(Bersambung ke halaman 8)

Apa itu Mikro Keuangan?

- ✓ Mikro keuangan adalah sebuah proses pemberian pinjaman dan pelayanan-pelayanan tabungan untuk segmen-segmen masyarakat yang sangat miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk berakses terhadap pelayanan-pelayanan tersebut dari sebuah bank normal. Teorinya adalah bahwa dengan berakses terhadap kredit masyarakat bisa memperoleh pendapatan tambahan dalam rumah-tangga mereka dan membangun usaha-usaha.
- ✓ Para penggerak mikro keuangan memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok ataupun orang-perorangan. Dan para peserta didalam sebuah kelompok sama-sama bertanggungjawab untuk membayar kembali pinjaman.
- ✓ Pinjaman-pinjaman mikro keuangan relatif kecil dan harus membayar kembali dalam jangka waktu yang singkat. Orang meminjam sejumlah kecil uang pada langkah pertamanya dan bisa meminjam lagi jika mereka telah membayar kembali pinjaman yang lalu. Seperti, pinjaman pertama bisa saja \$100 AS dan empat bulan kemudian telah dibayar kembali, dan dengan demikian selanjutnya bisa \$150 hingga \$200 dan seterusnya.
- ✓ Para penggerak mikro keuangan berusaha memperoleh sedikit pendapatan untuk menanggung biaya-biaya operasi sehingga dengan demikian bisa berkelanjutan. Agar bisa melakukan hal ini mereka menetapkan biaya-biaya administratif dan menaruh perhatian pada pinjaman-pinjaman mereka. Kebanyakan dari para penggerak mikro keuangan mengatakan bahwa mereka harus meraih lebih dari 30% dari pendapatan tahunan dari uang yang dipinjamkan oleh mereka agar tetap bisa berlanjut. Ini lebih tinggi dari sebuah bank normal.
- ✓ Para penggerak mikro keuangan biasanya mengalami kerugian uang dari lima hingga enam tahun pertama. Ini karena biaya-biaya awal yang tinggi, seperti mendirikan cabang-cabang dan mengadakan pelatihan staf lapangan. Hal ini memakan waktu untuk memberi pinjaman kepada kelompok-kelompok dan menetapkan serta memulai dengan pinjaman-pinjaman kecil dan karena itulah keuntungannya pun kecil.

Struktur Pengelolaan MFIET



MFIET menawarkan berbagai jenis pinjaman kepada berbagai kelompok, termasuk kaum miskin pedesaan dan perkotaan; NGO-NGO mikro keuangan, koperasi-koperasi dan serikat-serikat kredit; para penjual di pasar; petani-petani dan usaha-usaha mikro (usaha-usaha kecil). Secara tipikal seorang atau sekelompok mengambil pinjaman kecil dan pada saat mereka membayarnya kembali maka mereka dapat mengambil pinjaman yang lebih besar lagi. Pinjaman-pinjaman yang sifatnya lebih kecil adalah \$80 sedangkan yang terbesar adalah \$10.000 AS, yang hanya tersedia kepada para operator mikro keuangan. MFIET mengambil 5% dari setiap biaya pelayanan, sebagai tambahan untuk beban pinjaman yang bersangkutan.

Kelompok-kelompok yang ada memiliki jadwal pembayaran kembali yang berbeda-beda. Seperti misalnya para penjual di pasar membayar secara rutin sebaliknya apabila kaum kelompok perempuan pedesaan atau kelompok perkotaan mengambil pinjaman maka membayarnya secara mingguan atau dwi-mingguan. Bagi para petani yang mengambil pinjaman musiman hanya membayar beban pinjaman pada setiap bulan dan membuat sejumlah bayaran bulanan ketika jatuh tempo pinjaman.

Beban pinjaman sekitar 0,35% pada setiap minggu atau 1,5% pada setiap bulannya. Beban pinjaman yang bersangkutan tergantung pada banyaknya pinjaman dan jangka waktu pembayaran pinjaman. Bagi individu atau kelompok-kelompok yang menerima gaji yang dan yang mempunyai jaminan yang bisa membuat pinjaman \$500 atau lebih. Pinjaman-pinjaman tersebut dibayar secara angsuran pada setiap bulan dan beban pinjaman dibebankan pada sisanya. Ini artinya bahwa beban pinjaman hanya dibebankan pada jumlah bayaran yang belum dibayar kembali, sehingga begitu pinjaman dibayar kembali maka mengurangi bayaran bulanan.

Pada pinjaman-pinjaman kecil yang pembayarannya dalam jangka waktu pendek. Bebannya selalu dibebankan pada pinjaman pokok, yakni jumlah pinjaman semula, tidak dipersoalkan berapa banyak jumlahnya yang sudah dibayar kembali ataupun sudah dibayar dalam lebih awal. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil kerumitan dan administrasi sehingga klien-klien bisa membayar kembali jumlah yang harus dibayarnya dalam setiap bayaran cicilan, tetapi juga seolah-olah bahwa MFIET lebih memperhatikan pada pinjaman-pinjaman yang lebih kecil ketimbang pinjaman-pinjaman yang lebih besar.

Misalnya, pinjaman kelompok mikro keuangan kepada "proyek-proyek tambahan pendapatan" seperti kios-kios kecil. Pinjaman diberikan kepada kelompok yang terdiri dari lima

orang yang bertanggungjawab atas pembayarannya kembali. Pada mulanya mereka bisa meminjam \$100, dan membayarnya kembali dalam waktu 16 minggu dengan beban 0,35% pada setiap minggu. Termasuk pelayanannya kelompok yang bersangkutan harus membayarnya kembali jumlah keseluruhan \$110,60 AS. Jumlahnya adalah 35% dalam setahun dari pinjaman maupun pelayanan yang bersangkutan.

Sebuah pinjaman usaha pasar dapat diperoleh secara perorangan dengan sebuah kios atau usaha kecil pada salah satu pasar di Dili. Mereka membayar kembali hutang pinjaman dalam jangka waktu 13 minggu dengan bunga tambahan mingguan yang sama serta biaya pelayanan. Kesamaan biaya tambahan ini sama dengan 38% per tahun. Lih. tabel dibawah ini.

Wawancara dengan klien-klien

La'o Hamutuk mewawancarai klien-klien MFIET di pasar Comoro dan Taibesse begitu juga para peserta wakil dari kelompok-kelompok mikro keuangan di Dato Liquica. Kebanyakan diantara para peminjam mengatakan bahwa pembayaran cicilan tersebut sulit dan bahwa jangka waktu pembayaran pinjaman pun sangat pendek.

Maria, seorang ibu yang berusia 28 tahun statusnya ibu rumah tangga dan mempunyai tiga orang anak, mengatakan bahwa pinjaman tersebut adalah berkecukupan untuk mengelola usaha kecilnya untuk hidup. Dia menjual kopi manis dan dan juga menggunakan uang pinjaman tersebut untuk menginvestasi warungnya. Ia telah menerima pinjaman yang kedua kali sebanyak \$250 AS. Dia mampu membayar cicilan perhari sebesar \$2,50 AS, jikalau ada pembeli yang cukup banyak namun demikian ada banyak saingan dalam menjalankan bisnisnya dimana banyak warung-warung lain yang juga menjual kopi manis.

Bendita, adalah seorang janda yang berusia 40 tahun yang membiayai tujuh orang anaknya yang sedang bersekolah, juga mengambil kredit pinjaman usaha. Sebelum mengambil pinjaman dia menjual kacang merah dan jagung, setelah ia memperoleh pinjaman ia tetap menjual produk yang sama. Dia mengatakan bahwa ia harus menggunakan uang itu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pokok dari ketujuh orang anaknya dan tidak mampu menginvestasi kembali uang tersebut ke warung kecilnya. Menurutny, MFIET mengirimkan dua orang untuk melihat rumahnya, jenis usahanya dan menanyakan mengenai status perkawinannya (keluarganya). Dia mengatakan bahwa bila ia tidak membayar kembali hutang tersebut, maka ia akan diajukan ke pengadilan. Menurut institusi resmi ini adalah

Contoh berbagai pinjaman dan tarif pembayaran hutang

Tipe	Kelompok sasaran	Jumlah pinjaman	Jadwal	Pembayaran kembali	Biaya pelayanan	Bunga	Bunga efektif tahunan
Kelompok pinjaman mikro keuangan	Masyarakat miskin kota dan pedesaan	\$80 s/d \$250	112 hari	Mingguan	5%	0,35% per minggu dari hutang pokok	35%
Pinjaman usaha pasar	Pengusaha kios	\$200 s/d \$500	91 hari	Harian	5%	0,35% per minggu dari hutang pokok	38%
Pinjaman pengusaha kecil	Usaha kecil	\$2.000	Satu tahun	Bulanan	5%	1,5% per bulan dari sisa saldo	14%
Pinjaman karyawan	Perorangan untuk karyawan tetap. Staf MFIET	\$1.000	Satu tahun	Bulanan	5%	1,5% per bulan dari sisa saldo	14%

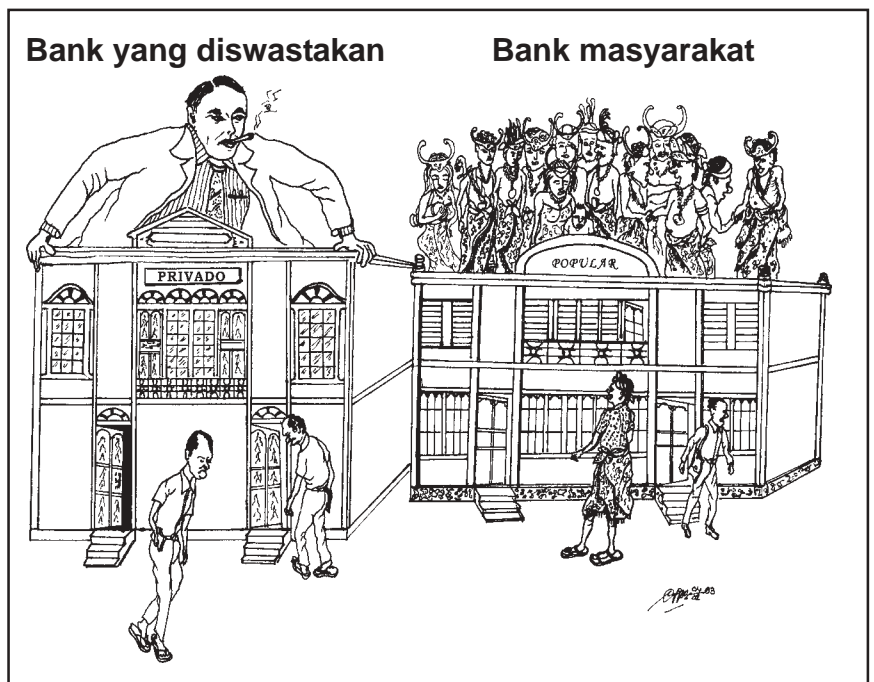
perjanjian dengan peminjam (klien).

Domingos berusia 46 tahun adalah mantan gerilyawan ia merupakan salah seorang yang pertama diantara para peminjam yang meminjam dari MFIET dan sekarang sedang dalam proses peminjaman yang ketiga kalinya dari lembaga ini. Pada mulanya ia meminjam \$200 AS kemudian \$350 AS dan sekarang \$400 AS. Ia menjual berbagai bahan kebutuhan rumah tangga, alat-alat rumah tangga khususnya barang-barang perlengkapan kamar mandi. Dan usahanya sangat berhasil tapi dia mengeluh bahwa cicilan harian yang sebesar \$4,60 AS merupakan beban yang sulit. Domingos mengatakan hal ini adalah merupakan keputusan pribadi tetapi ia berjanji tidak akan merekomendasikan kepada orang lain untuk mengambil pinjaman dari MFIET sejak ia menemui kesulitan dalam penjualan yang secukupnya untuk membayar kembali cicilan harian.

Kelompok peminjam dana mikro keuangan yakni Lucia berusia 41 tahun dan Ruben 26 tahun merasa bahwa pinjaman yang diberikan kepada mereka sangat kecil dan mereka ingin meminjam lebih banyak lagi. Salah satu anggota yang lain mengatakan walaupun setiap kelompok harus mempunyai 5 orang anggota MFIET seringkali meminjamkan kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil. Dia juga mengatakan bahwa para anggota yang ada dalam keluarga yang sama seringkali berada dalam satu kelompok, namun kelompok pinjaman tidak menyusun sendiri didalam satu keluarga. Masyarakat mengatakan bahwa sebagai akibat dari pinjaman tersebut maka banyak sekali kios-kios yang menjual barang-barang yang sama, dan hal itu akan menjenuhkan pasar. Para anggota tersebut mengatakan bahwa ada diantara kelompok yang tidak mampu membayar uang cicilan mingguan. Mereka tidak tahu apakah nanti mereka akan dituntut di pengadilan.

Dalam kunjungan resmi yang dilakukan terhadap para peminjam, para pejabat MFIET hanya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan jenis usaha dan modal usaha. Para pejabat tersebut seringkali pergi untuk melihat rumah peminjam tetapi tidak menanyakan lebih jauh lagi tentang kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan. Kepala desa Dato mengatakan bahwa ia tidak pernah dimintai pendapat atau konsultasi oleh MFIET yang seringkali memberikan pinjaman kepada orang-orang yang dia sendiri merasa bahwa orang yang bersangkutan tidak layak memperoleh pinjaman.

Kebanyakan dari para peminjam yang dapat ditemui oleh *La'o Hamutuk* mengungkapkan keinginan besar mereka tentang pengadaan pelatihan mengenai bisnis dan pengelolaan dana usaha. Ketika ditanyakan, tidak ada satupun diantara peminjam yang mengatakan bahwa mereka akan merekomendasi untuk meminjam dari MFIET. Mereka mengatakan bahwa ini adalah keputusan pribadi/perorangan, sebagaimana beban untuk membayar kembali beban pinjaman. Namun demikian para peminjam tersebut mengatakan bahwa mereka tidak menyukai beban pembayaran dan beberapa lagi merasa banyak sekali kesulitan untuk memperoleh hasil dari pinjaman tersebut. Di Liquiça, orang menginginkan pelayanan tabungan, dengan sebuah Bank cabang yang terdekat, supaya mereka bisa membuka rekening-rekening tabungan harian dan memperoleh bunga dari tabungan tersebut.



Kesimpulan

Ada beberapa pelaksanaan mikro keuangan di Timor Lorosa'e, namun kebanyakan proyeknya lebih kecil daripada MFIET. Operasi-operasi mikro keuangan selebihnya adalah pada pekerjaan-pekerjaan NGO untuk menyediakan dana pelayanan kepada masyarakat pedalaman yang miskin. Namun, salah satu tujuan utama dari proyek pembangunan mikro keuangan adalah untuk menambah pendapatan masyarakat pedalaman dan membuka lapangan kerja, MFIET secara besar-besaran memfokuskan diri di Dili dan baru-baru ini hanya membuka kantor di Gleno dan Maliana. Dalam wilayah-wilayah tersebut mereka mempunyai sangat sedikit klien apabila dibandingkan dengan pelaksana mikro keuangan lainnya. Salah seorang operator mikro keuangan yang beroperasi didaerah yang sama seperti yang di laporkan oleh MFIET bahwa masyarakat memahami bahwa MFIET adalah untuk "membantu kesejahteraan" masyarakat. Dan bahwa ada sedikit jurang perbedaan antara para klien dengan MFIET.

Sebagai perbandingan dalam efisiensi MFIET. Pada bulan Mei 2002, ADB bermaksud mencapai 10.000 kepala keluarga dengan dana awal sebesar \$2.000.000 AS. Pada saat itu MFIET hanya mencapai 1.533 peminjam, dimana diantaranya 1.014 berada di Dili. Agar bisa menjadi sebuah institusi yang berkelanjutan perlu memberi pinjaman yang lebih dari dana yang ada, yang sebaliknya telah digunakan dalam biaya-biaya operasi.

Kepala unit management proyek mengatakan bahwa rencana jangka panjang adalah bagi MFIET untuk berkembang menjadi sebuah Bank yang memberi pelayanan pinjaman dan tabungan lengkap dengan mesin-mesin ATM. Hal itu akan membutuhkan lebih banyak modal daripada dana \$2.000.000 AS dari TFET yang ada sekarang dan hal itu tidak mungkin akan melayani masyarakat miskin di dusun-dusun. Uang tersebut berasal dari mana? Apakah ADB akan memprivatisasi MFIET untuk mendapatkan modal? Dan apakah ADB akan melanjutkan kepemilikan MFIET kepada orang Timor Lorosa'e secara menyeluruh, ataukah kepada segelintir orang? ❖

Bank Pembangunan Asia dan Privatisasi di Timor Lorosa'e

Oleh Tim Anderson*

Bank Pembangunan Asia (ADB) hadir di Timor Lorosa'e atas undangan PBB dan negara-negara donor, Dana Hibah (TFET) untuk Timor Lorosa'e juga sebagai "adik" dari Bank Dunia. Bank-bank tersebut sama-sama mengembang tujuan utama mereka di bidang seperti "pengentasan kemiskinan," juga beberapa kebijakan yang kedengarannya mengiurkan.

Kendatipun demikian, Bank Dunia dan ADB juga sama-sama menggunakan metode yang sama dalam mendapatkan "pengentasan kemiskinan" dengan memberdayakan investasi swasta dari luar negeri dan memberi pinjaman, pemberian keistimewaan kepada para pengeksport asing dan memudahkan privatisasi swastanisasi (menjual atau menyerahkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki publik kepada perusahaan-perusahaan swasta). Tujuan mereka sesungguhnya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta yang dapat memberikan keuntungan bagi investasi asing. Sebagai bagian dari desakan ini, melalui koordinasi dengan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia ditetapkan untuk mempromosikan privatisasi dalam skala besar di Timor Lorosa'e.

Dua bank tersebut berargumentasi akan ada "perkawinan bahagia" antara keuntungan-keuntungan pribadi dengan keuntungan untuk orang miskin, tetapi sayangnya "perkawinan" ini tidak selalu bahagia. Bank Dunia pernah dikecam keras pada masa silam karena memaksakan proyek-proyek infrastruktur dalam skala besar tetapi sekarang Bank Dunia bangga bahwa prioritas-prioritas tersebut "telah berubah secara drastis," sambil menunjuk pada peningkatan pengalokasian dana untuk pendidikan dan kesehatan serta mengurangi pengalokasian dana untuk infrastruktur (listrik, jalan raya dan bendungan). Hal yang tidak disebutkan oleh Bank ialah bahwa di banyak negara termasuk Timor Lorosa'e, proyek-proyek infrastruktur yang kontroversial sudah dialihkan ke Bank Pembangunan Asia (ADB).

Para elit teknokrat yang biasanya memiliki sedikit hubungan dengan masyarakat yang memperoleh dampak dari proyek-proyek tersebut, selalu menguasai proyek-proyek infrastruktur yang terbesar tersebut. Proyek-proyek itu menjadi sangat tidak populer karena mereka melibatkan perusahaan-perusahaan konstruksi asing raksasa yang melakukan pemaksaan pemukiman kembali bagi orang-orang di sekitar proyek itu, merusak lingkungan dan biasanya memberikan pelayanan-pelayanan yang mahal serta keuntungan semu bagi masyarakat. Bank demikian mendanai proyek-proyek yang memerlukan manajemen yang bersifat swasta bagi perusahaan asing dan seringkali juga memberi beban hutang bagi pemerintah untuk pembangunan proyek itu. Ketika ada amarah dan protes terhadap privatisasi tersebut (seperti di Filipina, India dan Bolivia), Bank Dunia biasanya menyalahkan perusahaan asing atau cara pemerintah melaksanakan privatisasi mereka.

Dr Tim Anderson adalah dosen ekonomi politik di Universitas Sydney. Dia sudah lama memantau institusi-institusi keuangan internasional di Timor Lorosa'e atas nama organisasi "Aidwatch" Australia. Pandangan-pandangan yang disajikan dalam tulisan ini adalah pandangan penulis bukan pandangan dari staf La'o Hamutuk.

ADB Merancang Privatisasi untuk Timor Lorosa'e

Di Timor Lorosa'e, ADB mempunyai tanggungjawab untuk mengelola Mikro Keuangan dan Infrastruktur (jalan raya, pelabuhan, bandar udara, listrik, air dan sanitasi) semenjak tahun 1999. Namun belum ada satu pun di antara sektor-sektor ini yang sudah diprivatisasi. Akan tetapi privatisasi itu telah tiba. Di antara beberapa sektor tersebut meskipun kemerdekaan politik pada bulan Mei 2002 ADB masih tetap memiliki suara penentu.

Misalnya Yayasan ini didirikan (dengan dana bantuan \$4 juta AS dari TFET) untuk mengelola Lembaga Mikro Keuangan Timor Lorosa'e (MFIET) yang saat ini dikuasai ADB dan sejumlah negara donor terbesar lainnya. Orang-orang Timor Lorosa'e hanya mempunyai sedikit suara dalam lembaga ini. Barang kali ini penting jika ADB bermaksud mengubah MFIET menjadi institusi yang mengejar keuntungan pribadi. Dengan privatisasi, yang tampaknya menaikkan bunga (untuk memuaskan para pemegang saham), utang para peminjam akan "dijual" kepada pemilik-pemilik baru dan institusi akan kehilangan ciri-khas masyarakatnya. Akan tetapi siapa gerangan yang akan menentukan masa depan bank baru ini?

Pada sektor-sektor kelistrikan dan air bersih, ADB sudah mempunyai agenda khusus termasuk jadwal privatisasi (yang mereka namakan "partisipasi" dan "kemitraan"), kendatipun terobosan-terobosan serupa bukan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Nasional Timor Lorosa'e. Privatisasi bisa juga melanggar beberapa aspek dari konstitusi negara baru ini yang sedang berupaya untuk mempertahankan hak milik lokal mengenai tanah dan "kedaulatan tetap" atas kekayaan dan sumber daya alam Timor Lorosa'e.

"Laporan kemajuan tentang Timor Lorosa'e" dari ADB pada Mei 2002 menggambarkan secara kasat mata rencana privatisasi air bersih. Tema pokok tulisan ADB "Air bersih untuk abad kedua puluh satu" juga memperjelas tekad ADB di seluruh Asia guna mengalihkan air bersih "dari barang publik menjadi barang komoditas". Namun apa artinya akses bagi orang miskin terhadap air bersih? Dan mandat politik apa yang dimiliki oleh ADB untuk mendesak adanya privatisasi air bersih di Timor Lorosa'e?

Pada bulan Agustus, ADB menerima laporan konsultan mengenai sektor tenaga listrik di Timor Lorosa'e dari Corporation Hydro-Electric (sebuah organisasi yang bertanggungjawab terhadap nama buruk proyek Bendungan Franklin Australia yang mana diberhentikan karena protes dan dibuatnya undang-undang pada tahun 1983). Bisa diperkirakan bahwa laporan-laporan HEC merekomendasikan privatisasi atas pengelolaan tenaga listrik untuk memperkenalkan sebuah sistem pengajuan program yang menghadapi gangguan berulang kali di kota-kota di Timor Lorosa'e. Tetapi mengapa Timor Lorosa'e memerlukan privatisasi dan biaya yang sangat mahal bagi infrastruktur kelistrikan? Pengelolaan lokal harus diberi kesempatan untuk bekerja dan juga Timor Lorosa'e mempunyai sumber-sumber minyak dan gas yang cukup banyak yang bisa digunakan untuk tenaga listrik di masa mendatang.

Privatisasi yang dikelola oleh ADB akan dipaksakan di Timor Lorosa'e sebab di mata para investor asing mereka adalah baik tetapi bukan karena mereka baik terhadap Timor

Lorosa'e. Sekalipun begitu ketidak-amanan Timor Lorosa'e mengenai kekurangan-kekurangan fasilitas utama bisa memberi kemudahan bagi alasan-alasan privatisasi. ADB sedang berargumentasi bahwa Timor Lorosa'e tidak memiliki modal atau ahli untuk pengadaan listrik, air bersih dan sanitasi paling utama, akan tetapi argumen-argumen tersebut menyesatkan.

Mengatur tekanan privatisasi

Adalah penting untuk diketahui bahwa ada bahaya-bahaya yang terselubung di dalamnya dan alternatif-alternatif baik mengarah pada privatisasi; dan dengan demikian maka orang Timor Lorosa'e dapat mengatur tekanan-tekanan akan privatisasi.

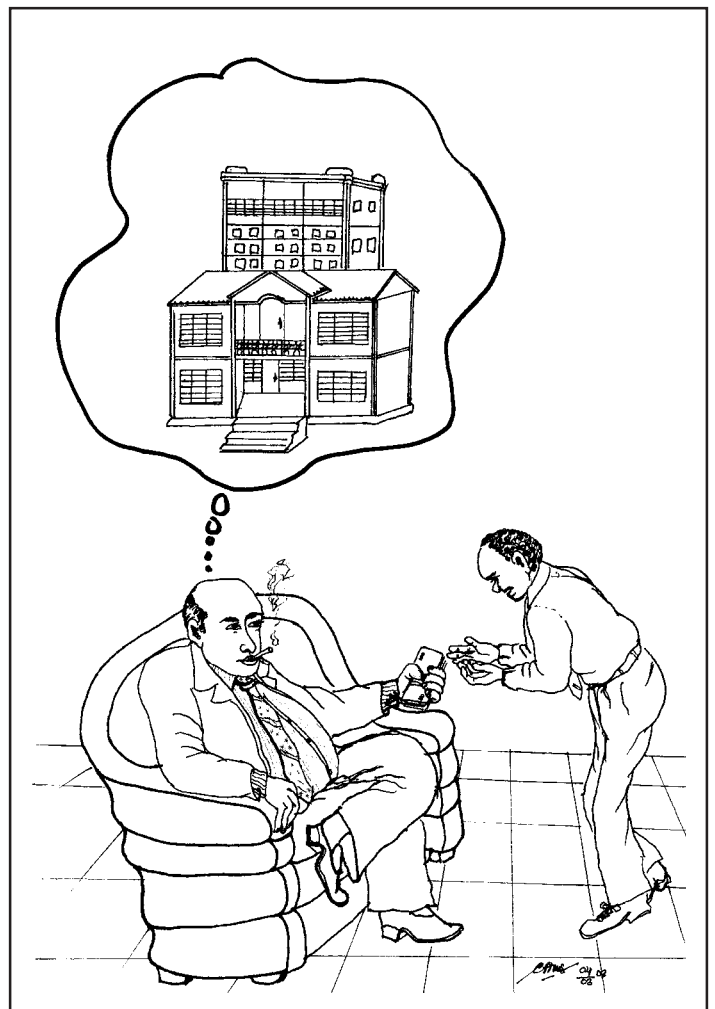
Bahaya-bahaya privatisasi juga meliputi pelayanan-pelayanan dengan biaya tertinggi (monopoli-monopoli swasta hampir selalu menaikkan harga) bahkan lebih parah lagi tidak ada keseimbangan akses terhadap tenaga listrik dan air bersih, hilangnya mekanisme untuk keluhan-keluhan publik (sesuai dengan Konstitusi Timor Lorosa'e Ombudsman hanya dapat menangani tindakan-tindakan melalui "badan-badan publik") dan juga hilangnya transparansi dan akuntabilitas. Meskipun ADB dan Bank Dunia menganjurkan adanya transparansi, "perdagangan atas dasar kepercayaan" klaim itu selalu jalan bersamaan dengan privatisasi. Ini artinya bahwa data-data keuangan dan data-data penting lainnya tidak lagi untuk publik.

Usulan-usulan tertentu untuk menswastakan pelayanan-pelayanan utama di Timor Lorosa'e menjadi bahan untuk proses penyelidikan formal, yang ditetapkan oleh parlemen agar menyadari persoalan-persoalan seperti berikut ini:

1. Apa dampaknya terhadap para konsumen dan bagaimana harga yang tinggi bisa dikontrol?
2. Bagaimana orang-orang miskin bisa mempunyai akses terhadap pelayanan-pelayanan utama (tenaga listrik dan air bersih)?
3. Bagaimana bisa ada akses terhadap informasi mengenai pelayanan-pelayanan yang ada?
4. Bagaimana pertanggungjawaban publik tentang pelayanan-pelayanan tersebut menjadi pelayanan terbaik?
5. Siapa yang meraih keuntungan dari penjualan aset-aset publik?

Barang kali inilah masalahnya sesudah pengujian seperti itu diputuskan bahwa kepemilikan dan pengelolaan dari pelayanan-pelayanan utama paling baik ada ditangan publik, atau sekurang-kurangnya ada pada usaha patungan/usahan bersama dimana pemerintah tetap mengontrol 50% tetapi kepemilikan saham ada pada perusahaan swasta.

Pengalaman dimana saja di dunia ini menunjukkan bahwa fasilitas publik lebih efisien dari fasilitas-fasilitas swasta. Para peneliti di Universitas Kerajaan Inggris dari Greenwich sudah memperlihatkan itu sebagai contoh bahwa para penyedia air bersih milik publik di Swedia lebih efisien dan lebih murah daripada para penyedia air bersih swasta di Inggris. Di negara-negara yang miskin sudah ada pengalaman-pengalaman semacam itu. Di Bolivia, pembangunan kerjasama penyediaan air bersih di Santa Cruz lebih baik daripada privatisasi yang membawa malapetaka yang dilakukan di Cochabamba. Masalah yang paling akhir adalah semakin tingginya harga dan banyak protes terhadap privatisasi. Pada tahun 1994 Honduras memilih untuk menolak privatisasi atas penyediaan air bersih nasional



(SANAA) memberi dukungan untuk reorganisasi internal dan perhitungan yang efektif. Pengajuan program-program menemukan kembali biaya dan pertimbangan restrukturisasi yang diinginkan oleh SANAA, dimana saat ini PBB menganggap sebagai model proyek publik. Timor Lorosa'e bisa belajar dari pengalaman-pengalaman ini.

Dalam hal tenaga listrik, privatisasi bukan satu-satunya dan bukan pula jawaban terbaik atas kemacetan listrik atau padamnya listrik yang membuat frustrasi di kota-kota besar dan kecil di Timor Lorosa'e. Gas alam dari ladang Bayu-Undan dapat mengisi turbin gas yang berukuran kecil dan sedang untuk kota-kota itu, sementara itu geothermal yang berukuran kecil, tenaga surya maupun kincir air bisa menjamin tenaga listrik yang murah dan berkelanjutan untuk kota-kota tersebut.

Dalam hal mikro keuangan yang berbasis pada masyarakat, biaya pemulihan bagi pelayanan dapat dipertahankan tanpa bersumber pada privatisasi. Pengoperasian mikro keuangan dunia yang sangat sukses yakni Bank Grameen dari Bangladesh memperlihatkan hal ini. Mengapa tidak minta saja nasihat ahli mikro keuangan dari Grameen daripada para banker grosir di ADB?

Orang Timor Lorosa'e bisa mengatur tuntutan ADB untuk memprivatisasi pelayanan-pelayanan utama tersebut jika mereka mencurahkan perhatian terhadap berbagai persoalan, alternative-alternatifnya serta inisiatif-inisiatif dari masyarakat pribumi. Konstitusi yang baru, parlemen dan badan perencana Pembangunan Nasional menyediakan semua sarana prasarana untuk hal ini.

Orang Timor Lorosa'e bisa bersuara dan ADB harus mendengarkannya. ❖

Laporan Tentang Konferensi Internasional Pembangunan Kembali Paska Konflik di Hiroshima, Jepang

Institut Pelatihan dan penelitian PBB atau UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) menyelenggarakan sebuah konferensi internasional mengenai rekonstruksi paska konflik selama tiga hari, mulai dari tanggal 11-13 November 2002 di kota Hiroshima, Jepang. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan PBB, pemerintah dan LSM dari berbagai negara konflik di Asia termasuk utusan dari *La'o Hamutuk* yang diwakili oleh Akara Juvinal.

Konferensi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membagi pengalaman, tukar pikiran dan saran serta mencari solusi alternatif bagi rekonstruksi negara-negara yang mengalami kehancuran dan baru saja keluar dari kemelut konflik (konflik militer, politik, agama dan sebagainya).

Untuk mengetahui pandangan dan konsep rekonstruksi dari negara-negara peserta konferensi, UNITAR membagi sesi presentasi dan diskusi dalam beberapa bagian kemudian para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap misi PBB dan institusi-institusi internasional yang terlibat dalam proses rekonstruksi di negara-negara pasca konflik.

Konferensi difokuskan pada negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Kamboja dan Timor Lorosa'e dan mengidentifikasi perbedaan konsep dan pendekatan untuk merekonstruksi negara-negara tersebut. Dalam beberapa persoalan, ketepatan dan kesudahan sejarah dikorbankan agar mencapai konsiderasi diplomasi sekarang atau untuk memproteksi perasaan pemerintah yang kuat atau institusi-institusi.

Jepang

Topik utama yang diangkat oleh delegasi Jepang pada konferensi ini adalah proses perkembangan rekonstruksi paska penghancuran kota Hiroshima yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam perang dunia dua pada tahun 1945.

Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan dengan bom atom yang juga menewaskan warga Jepang sekitar 200.000 orang, masyarakat Jepang mulai memobilisir kesadaran berbangsa untuk merekonstruksi kehancuran itu. Akhirnya mereka bangkit dengan slogan "Jangan terulang lagi kejadian Hiroshima dan Nagasaki" yang kemudian diimplementasikan lewat tiga strategi pembangunan; melupakan peristiwa pemboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat, memobilisasi dana melalui swadaya masyarakat dan merekonstruksi negara itu secara damai.

Dengan semangat merekonstruksi secara damai itulah, kota Hiroshima berhasil ditata kembali dan akhirnya dunia pun mengakui dan berbangga atas keberhasilan itu. Karena itu pula masyarakat internasional melalui PBB memiliki kecenderungan untuk memilih kota Hiroshima menjadi sample keberhasilan rekonstruksi dalam paska konflik. [Wakil pemerintah yang melakukan presentasi tidak menyinggung bahwa Jepang berada di bawah pendudukan militer Amerika Serikat selama tujuh tahun pertama dalam proses rekonstruksi. Pertumbuhan pembangunan ekonomi Jepang paska perang disebabkan oleh dipakai Jepang sebagai basis militer dan PBB selama perang Korea.]

Korea Selatan

Delegasi Korea mengangkat topik tentang bantuan Amerika Serikat dan badan-badan PBB seperti UNESCO, UNECEF dan WHO serta peranan dan fungsi badan-badan asing itu dalam proses rekonstruksi nasional. Menurut mereka, Korea Selatan dengan mudah mengatasi kesulitan dalam merekonstruksi negaranya karena banyak badan internasional terlebih Amerika Serikat yang memberikan bantuan kepada Negara tersebut. Disamping bantuan Amerika Serikat yang mencapai 95%, ada juga bantuan multilateral yang berasal dari badan-badan PBB seperti UNESCO, UNICEF dan WHO.

Delegasi Korea menyebutkan juga bahwa keberhasilan rekonstruksi itu disebabkan oleh intervensi dan pengawasan langsung oleh badan pemberi bantuan terhadap proses implementasi rekonstruksi serta melakukan reformasi institusi-institusi melalui pemimpin-pemimpin di Korea Selatan.

Dengan program pengawasan dan pengontrolan dari badan-badan PBB dan para donator ini, maka beberapa peserta kemudian berpikir bahwa mungkin model rekonstruksi di Korea Selatan bisa menjadi acuan bagi PBB dan negara-negara donor untuk membantu negara lain yang dilanda konflik. [Namun delegasi itu juga tidak menyebut bahwa Korea Selatan diperintah oleh beberapa diktator yang didukung oleh militer Amerika Serikat mulai dari berakhirnya peperangan pada tahun 1953 sampai pada tahun 1988 dan sampai sekarang pun tentara Amerika Serikat masih tetap berada di Korea Selatan.]

Vietnam

Dalam presentasinya wakil Vietnam mengatakan bahwa negaranya dibangun kembali dengan bantuan negara-negara asing terutama Uni Soviet, setelah Amerika Serikat meyakinkan Korea Selatan dan Uni Soviet mendukung Korea Utara selama lebih dari satu dasawarsa peperangan yang berakhir pada tahun 1975. Kemudian tahun 1990, ketika Vietnam bergabung dengan kapitalis ekonomi dunia, mereka juga menerima bantuan dari Amerika Serikat, badan-badan PBB, ADB dan NGO internasional.

Menurut Dr. Nguyen Quang Thai, ada tiga konsep strategi yang dikembangkan dalam mengimplementasi program rekonstruksi negara Vietnam. Ketiga konsep strategis itu antara lain; menciptakan kondisi stabilitas dan perdamaian, mengembangkan konsep bantuan internasional menjadi bantuan yang bersifat partnership dan mengorientasikan bantuan itu pada kepentingan rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kamboja

Ada tiga pandangan yang saling bertolak belakang tentang proses rekonstruksi yang presentasikan oleh tiga wakil dari negara Kamboja. Yasushi Akashi, bekas coordinator Otoritas Transisi PBB di Kamboja (UNTAC) mengatakan

bahwa PBB telah berhasil menjalankan mandatnya dalam merekonstruksi Kambojia. Mandat yang dianggap telah berhasil dijalankan dengan baik itu antara lain; rehabilitasi infrastruktur secara darurat, memulangkan pengungsi, menyelenggarakan pemilihan untuk anggota parlemen dan membentuk pemerintahan baru.

Menteri dalam negeri Kambojia, Mr. Prum Sokha malah menilai bahwa pemerintah mengalami kesulitan ketika UNTAC meninggalkan Kambojia. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintahnya sedang mengimplementasikan tiga strategi pembangunan antara lain; menciptakan stabilitas dan perdamaian dan mempertahankan keamanan, menggalang persatuan nasional dan normalisasi hubungan internasional serta meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi. Kesemua proses ini dipantau oleh negara-negara donor melalui bank dunia.

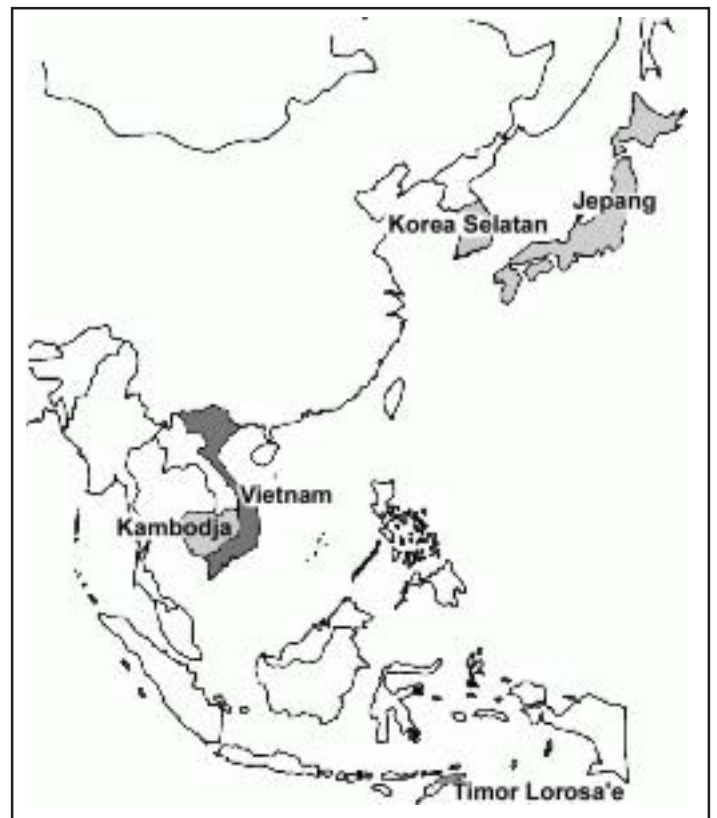
Sebaliknya Ms. Boua Chanthou wakil masyarakat sipil Kambojia memberikan pandangan yang berlawanan dan bahkan ia menuduh UNTAC tidak mampu melucuti senjata dari fraksi-fraksi militer dan sipil serta tidak bisa menetralkan kekuatan militer pemerintah yang ada. UNTAC gagal membangun institusi pemerintahan yang demokratis akibatnya pemerintah sekarang bertindak diktator dan tidak menjalankan proses demokratisasi bagi masyarakat sipil.

Timor Lorosa'e

Ada tiga utusan yang memberikan pandangan tentang proses rekonstruksi Timor Lorosa'e. Ketiga utusan itu antara lain Mr. Peter Galbraith mantan direktor politik UNTAET, Ms. Sachiko Takeda dari AICAT sebuah LSM yang berbasis di Hiroshima dan Ms. Michele Brandt dari Asia Foundation.

Gabraith mengatakan bahwa misi perdamaian PBB yang paling berhasil adalah UNTAET dibawah kepemimpinan Dr. Sergio Vieira de Mello. Menurut Galbraith ada lima indikator keberhasilan UNTAET yakni mempersiapkan kemerdekaan, mendapat dukungan sumberdaya (manusia dan dana) yang memadai untuk menjalankan mandat misi perdamaian PBB, UNTAET sangat kreatif, fleksibel dan tegas, model struktur kepemimpinan "arus bawah" membentuk pemerintahan bersama dengan pemimpin Timor Lorosa'e melalui pemerintah transisi internasional juga mengadakan negosiasi internasional atas kekayaan alam Timor Lorosa'e terlebih minyak dan gas di Timor Gap. UNTAET memiliki pemimpin yang baik dan kuat yang mendapat kepercayaan dari masyarakat Timor Lorosa'e. Pemimpin itu adalah Sergio de Mello.

Sedangkan dari kalangan LSM yang diwakili oleh Ms. Sachiko Takeda dan Ms. Michele Brandt mempresentasikan pandangan yang berbeda dengan wakil UNTAET. Mereka mengatakan bahwa UNTAET kurang melakukan pemberdayaan bagi masyarakat Timor Lorosa'e. Contoh yang diangkat adalah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat dimana staf internasional yang membuat draf Undang-Undang tanpa melibatkan masyarakat Timor Lorosa'e. UNTAET lebih sering melakukan usaha-usaha yang bersifat uji coba hukum dari pada membangun kerangka hukum yang sistematis dan terencana dengan pemimpin-pemimpin Timor Lorosa'e.



Kesimpulan

Nampaknya konferensi Hiroshima merupakan kesempatan yang baik untuk mencari solusi alternatif bagi pembangunan kembali negara-negara yang dilanda konflik. Namun persoalannya adalah keterbatasan waktu yang disediakan akibatnya para peserta kurang memperoleh kesempatan untuk mendiskusikan model pembangunan alternatif secara mendetail.

Berdasarkan pengamatan, tidak semua negara mengalami kesuksesan karena setiap negara memiliki akar persoalan yang berbeda-beda serta mempunyai tradisi penyelesaian yang berbeda pula. Karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam merekonstruksi negara yang bersangkutan adalah akar persoalan, tradisi dan kebutuhan masyarakat setempat serta proses pemberdayaan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat setempat.

Timor Lorosa'e merupakan salah satu contoh dimana UNTAET menyanjungkan keberhasilan misinya melalui strategi perampungan mandat, seperti yang dilontarkan oleh Peter Galbraith. Namun masih kurang disadari dan disinggung bahwa UNTAET tidak memfasilitasi tradisi dan nilai perjuangan bangsa Timor Lorosa'e, pemberdayaan dan mengikutsertakan masyarakat gerakan misinya.

Harus diakui bahwa selama tiga tahun misi perdamaian PBB di Timor Lorosa'e telah menciptakan stabilitas keamanan yang baik dan telah menangani persoalan kemanusiaan dengan baik baik. Namun jika dilihat dari segi administrasi transisinya, UNTAET meninggalkan beranekaragam persoalan bagi masyarakat Timor Lorosa'e dan "rekonstruksi paska konflik" di negara ini sangat sulit untuk dimulai. Persoalan bangsa yang ditinggalkan itu diantaranya adalah kepemimpinan "arus atas" yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif ada di tangan Sergio de Mello. Hal ini telah mewarisi persoalan dalam proses demokratisasi, penegakan hukum dan pemberdayaan administrasi di Timor Lorosa'e pasca UNTAET. ❖

Pendidikan Tinggi di Timor Lorosa'e

Timor Lorosa'e sebagai sebuah negara baru sudah mulai berusaha untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang. Bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas utama program pemerintah Republik Demokratik Timor Lorosa'e.

Menurut konstitusi RDTL pasal 59 ayat 3 bahwa pemerintah mengakui dan mengawasi pendidikan swasta dan pendidikan bersama, dengan demikian memberi kesempatan dan peluang kepada pendidikan swasta mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan tingkat perguruan tinggi.

Konstitusi RDTL itu juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Namun tidak berarti bahwa masyarakat boleh beramai-ramai mendirikan perguruan tinggi diluar kemampuan dan kebutuhan-kebutuhan negara RDTL. Banyak hal yang menjadi tuntutan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Dana dan fasilitas merupakan faktor yang penting namun kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa sebuah institusi pendidikan tinggi yang baik harus menghasilkan kualitas lulusan yang profesional di bidangnya masing-masing bukan hanya sekedar mencetak gelar. Karena itu, kualitas para dosen dan sistem pengajaran sangat diperlukan untuk menyediakan teori dan keahlian yang profesional di ruang kuliah.

Lembaga Pendidikan Tinggi di Timor Lorosa'e

Hingga akhir 2002, *La'o Hamutuk* mengidentifikasi 14 buah perguruan tinggi di Timor Lorosa'e. Informasi yang kami dapatkan dalam tabel berikut ini (kebanyakan diperoleh dari Departemen Pendidikan), tetapi informasi tersebut bisa saja berubah dikemudian hari. Tabel informasi ada di halaman berikutnya.

Dari ke-14 perguruan tinggi tersebut hanya ada satu universitas yang dikategorikan sebagai universitas negeri atau pemerintah yaitu Universitas Nasional Timor Lorosa'e (UNATIL). UNATIL telah mendapatkan dukungan dan subsidi dana sebesar 70% dari pemerintah dan para dosennya dianggap sebagai pegawai negeri yang mendapatkan gaji dari pemerintah.

Selain itu, lembaga ini juga telah memperoleh bantuan sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah untuk merehab gedung kampus, menyediakan kursi, meja serta fasilitas perpustakaan, termasuk bantuan dari negara-negara lain seperti; Portugal membantu fakultas pertanian dan pelatihan bagi dosen-dosen, Australia membantu fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Amerika membantu rekonstruksi bangunan gedung, dan Jepang membantu fakultas teknik.

Perguruan tinggi swasta yang kini banyak didirikan, pada umumnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk menjawab kebutuhan para lulusan SMA agar bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi serta untuk mengembangkan sumber daya manusia Timor Lorosa'e. Tujuan pertama barangkali telah dapat diatasi pada saat ini. Timor Lorosa'e pada masa pemerintahan transisi UNTAET telah memiliki dua buah universitas antara lain UNATIL dan UNDIL, namun kedua universitas tersebut tidak bisa

menampung dan tidak dapat merespon kebutuhan semua lulusan SMA untuk mengenyam pendidikan tinggi dan eks mahasiswa baik yang sebelumnya melanjutkan pendidikan di Indonesia maupun di universitas Dili, yang studinya terpaksa berhenti pada tahun 1999.

UNATIL sesungguhnya telah berdiri sejak periode integrasi dengan nama Universitas Timor Timur (UNTIM) sebagai sebuah universitas negeri atau publik, namun pada saat setelah referendum 1999 pihak militer Indonesia dan milisi menghancurkannya. Hampir sebagian besar dosen yang berasal dari Indonesia meninggalkan Timor Lorosa'e. Di bawah pemerintah UNTAET, Universitas ini dibangun kembali dan dinamakan UNATIL yang kemudian berubah status menjadi universitas negeri dibawah pemerintahan yang sekarang.

Sedangkan, UNDIL sebelumnya hanya sebagai sebuah institut tinggi swasta yang dikenal dengan nama Institut Superior de Economia e Gestão (ISEG). Institut ini di dirikan pada tahun 1998, setahun sebelum referendum dilaksanakan. Pada periode UNTAET institute ini didirikan kembali dan berjalan lagi dengan nama yang sama dengan fasilitas seadanya di Balide. Namun setelah merdekanya Timor Lorosa'e pada 20 Mei 2002, ISEG berubah dari institute tinggi menjadi sebuah Universitas dengan nama UNDIL.

Namun demikian, dari hasil pengamatan *La'o Hamutuk* terhadap beberapa perguruan tinggi seperti yang tercantum dalam tabel diatas, kondisi lembaga-lembaga tersebut sangat memprihatinkan yakni mempunyai fasilitas yang sangat minim dan tenaga dosen yang rata-rata memiliki gelar Strata satu (S1) dan bahkan ada yang bergelar diploma. Walaupun lembaga-lembaga pendidikan itu memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang terbatas, lembaga-lembaga tersebut telah didirikan dan telah melaksanakan proses pendidikan. Kualitas lembaga harus mempunyai fasilitas yang memadai pada pelayanannya seperti laboratorium, perpustakaan, fasilitas seni dan olah raga, pusat informasi dan juga kualitas pengajaran.

Bantuan Donatur untuk Perguruan Tinggi Swasta

Hampir semua perguruan tinggi di atas kekurangan dana, dosen dan fasilitas. Satu-satunya bantuan yang mereka terima berasal dari partner dan para donatur Internasional. Daftar berikut memuat beberapa jenis bantuan yang telah membantu beberapa lembaga pendidikan tinggi untuk memulai aktivitasnya; kami tidak sempat menyediakan daftar yang lengkap tentang semua bantuan kepada lembaga-lembaga yang ada.

- √ UNDIL mendapatkan fasilitas komputer yang cukup banyak dari Universitas Melbourne, Australia dan buku-buku dari Indonesia.
- √ Universitas Maulear, mendapatkan bantuan dana sebesar \$3.000 AS dari perkumpulan pengusaha Cina di Hongkong, kursus informatika dan pariwisata serta tenaga pengajar dari organisasi pengusaha Bali, Indonesia, dan fasilitas berupa dua unit komputer, meja,

(Bersambung ke halaman 16)

Institusi Pendidikan Tinggi di Timor Lorosa'e

Nama	Lokasi	Kepemi- lihan	Rektor	Maha- siswa	Dosen	Fakultas	Biaya/ semester	Komentar
Universitas Nasional Timor Lorosa'e (UNATIL)	Dili	Pemerintah RDTL	Benjamin de Araujo Cortereal	6.000	126	5: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pertanian, Pendidikan, Ekonomi, Teknik	\$80? (mulai dari \$30 pada 2000-1, \$40 pada 2001-2)	Biaya SPP terbaru menimbulkan perselisihan; mungkin ada perubahan.
Fundação Universidade Portugal (FUP)	Dili	Pemerintah RDTL		160	20 (setiap semester berubah)	5 jurusan: Informatika, Ekonomi, Elektronik, Pertanian, Bahasa Portugis		Terdapat pendidikan khusus Bahasa Portugis di UNATIL
Universitas Dili (UNDIL)	Dili	Yayasan Dom Boaventura	Dr. Lucas da Costa	1.822	40	5: Ekonomi & Manajemen, Ilmu Sosial & Hubungan Internasional, Kesehatan Masyarakat, Hukum, Teknik (Industri & Arsitektur)	\$135	Didirikan oleh orang-orang yang terlibat dalam Organisasi RENETIL (Resistencia Nasional Estudante Timor Lorosa'e di Indonesia)
Universitas Maulear	Dili	Yayasan Maulear	Feliciano da Costa	305	18 dosen (5 tetap 13 tidak tetap)	3: Hukum, Hubungan International, Bahasa dan Sastra	\$80	Menyediakan Sarjana strata satu diploma (D3). Didukung oleh Rogerio Lobato.
Universitas Jupiter (Unter)	Dili	Yayasan Saint	Francelino da Silva Correia	120	36 (1 dosen PhD, 35 dosen Sarjana S.1)	4: Teknik, Kelautan dan perikanan, Pertanian dan Kehutanan, Biologi dan Matematika	\$120 (\$180 untuk mahasiswa matrikulasi tiga bulan)	Didirikan oleh SMA Finantil
Universitas Continental (Uicon)	Dili	Yayasan Continental	Florindo Pereira	404	30	6: Hukum, Ilmu Politik, Pertanian, Keguruan, Teknik, Ekonomi	\$68	Berkolaborasi dengan Col. Lere Anan Timor dari FDTL
Universitas Dom Martinho (Unimar)	Dili	Yayasan Dom Martinho	Baltazar Manekehi	100	15 dosen (5 tetap 10 tidak tetap)	4: Ekonomi, Ilmu Sosial dan Politik, Teknik, Hukum	\$35	Telah Direncanakan, namun belum berjalan dengan efektif.
Universitas Boa Ventura	Manufahi		Egas Barros			Pertanian		
Universitas Komunitas Matebian (UCM)	Baucau		Francisco Parada	175	12	4: Hukum, Ekonomi, Pertanian, Pendidikan Keguruan		
Institut Bisnis (IOB)	Dili	Yayasan Klibur Mata Dalam ba Koperativu no Fila Liman	Agusto da Conceição	78	24 (20 orang Strata 1 dan 3 MS, 1 PhD)	3 Jurusan: Manajemen Keuangan, Manajemen Umum, Akuntansi	\$300	
Institut Teknologi Dili (DIT)	Dili dan Oecusse	Yayasan DIT	João Cancio Freitas	200 (Dili); 168 (Oecusse)	28 dosen (8 tetap 20 tidak tetap)	2 jurusan: Bisnis dan Manajemen, Teknik	\$90 (B&M) \$120 (teknik)	Berkolaborasi dengan Asosiasi Veteran Perlawanan (AVR) dan Kirsty Sword Gusmão
Instituto de Ciências Religiosas (ICR)	Dili (Lahane)	Gereja Katholik	Pastor Yulius Yasinto	60	10 (kurang-lebih)	Institut untuk katekis dan pembantu Pastor	\$60	
IKIP Kristal, Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Dili (Balide)	Yayasan Kristal	Antonio Cabral			Pendidikan untuk Guru SMP dan SMA		
IKIP Kristal, Gleno	Gleno- Ermera	Yayasan Kristal	Arnando Martins de Deus			Pendidikan untuk Guru SMP dan SMA		
Institut untuk Pelatihan Guru-guru Katholik	Baucau	Diosis Baucau				Pelatihan bagi guru-guru SD dan SMP		Didirikan pada tahun 2000; dikelola oleh Bruder Maritas (Australia)

Universitas
Institusi yang lain

kursi dan alat-alat kantor dari Victoria-Melbourne dan Departemen Pendidikan Australia.

- √ Dom Martinho mendapat bantuan fasilitas 17 unit komputer untuk jurusan informatika dari Selandia Baru.
- √ DIT bekerja sama dengan universitas Victoria, Australia terutama dalam hal pertukaran dosen dan mahasiswa untuk melakukan study banding serta kerja sama di bidang penelitian, dan mendapatkan bantuan komputer sebanyak 40 unit dari ANZ dan 40 unit dari Universitas Victoria.
- √ IOB telah menerima dukungan penuh dari beberapa institusi untuk pembangunan kampus, kursi, lemari, komputer, perpustakaan dan laboratorium. Gaji untuk para dosen dibayar oleh USAID dan dari proyek kope-rativ kopi, NCBA.

Kami yakin bahwa para donatur yang memberi bantuan kepada pendidikan tinggi mempunyai kewajiban untuk memberi perhatian dan evaluasi tentang keperluan dan masalah dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada dari perspektif yang lebih luas, dan tidak hanya membantu area tertentu dengan tidak mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan pemerintah Timor Lorosa'e.

Mengapa para donor memberikan bantuan untuk mendirikan universitas swasta?

Franqelino da Costa Freitas dari universitas Malear mengatakan kepada *La'o Hamutuk* bahwa dia tidak mengetahui kepentingan dan alasan dari para donatur secara terselubung tetapi yang jelas pasti ada tujuan tertentu yakni agar nama institusi mereka semakin dikenal, ada kesempatan untuk berbisnis di Timor Lorosa'e dan juga untuk mengharmoniskan nama negara mereka di Timor Lorosa'e.

Kalau para donatur ingin membantu para lulusan SMA, alangkah baiknya mereka mendukung Universitas-Universitas yang telah ada seperti UNATIL dan UNDIL, agar bisa lebih banyak menampung mahasiswa, dan memperbaiki kualitas institusi dan lulusan sarjana mereka.?

Menurut donatur internasional bahwa mereka ingin membantu melaksanakan program pemerintah dan membantu mengembangkan masyarakat Timor Lorosa'e di level pendidikan tinggi. Dan alasan mengapa mereka tidak membantu UNATIL dan UNDIL adalah bahwa telah ada pemerintah dan negara lain yang membantu kedua universitas tersebut, sehingga mubajir kalau semua orang hanya membantu kedua universitas tersebut.

Nampaknya para donatur lebih suka membantu lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh badan-badan swasta dari pada membantu UNATIL yang dimiliki oleh masyarakat umum. Jika donatur memfokuskan bantuan pada UNATIL, maka lembaga itu akan menguntungkan pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh universitas negeri yang besar dan berkualitas tinggi yang menampung banyak mahasiswa dengan pendidikan yang baik.

Sebaliknya, dua donatur yang membantu lembaga-lembaga tinggi swasta mengatakan pada *La'o Hamutuk* bahwa karena UNATIL dipengaruhi oleh Portugal, Institusi internasional dari negara lain tidak mau membantu UNATIL.

UNATIL memperoleh bantuan dari pemerintah Portuguese (Institut Camões melalui Yayasan Universitas Portugal (FUP)). FUP didirikan sebagai wujud bantuan portugal kepada Timor Lorosa'e untuk bekerja sama dengan UNATIL yang mana semua mata kuliah diajarkan dalam bahasa Portuguese dan semua dosennya berasal dari Portugal.

Peraturan pemerintah mengenai UNATIL

Sekarang ini pemerintah sedang membiayai UNATIL namun statusnya sebagai Universitas negeri secara resmi belum ditentukan sebab tidak ada peraturan atau dasar hukum yang mengatur atau menjelaskan tentang status. Peraturan untuk mendirikan UNATIL sebagai Universitas negeri (Estatuto da Universidade Nacional Timor Lorosa'e) telah dirancang dan telah diberikan kepada Menteri Pendidikan yang kemudian akan dipelajari oleh Dewan Menteri.

Selama ini Universitas Nasional Timor Lorosa'e didanai oleh pemerintah namun belum jelas statusnya sebagai lembaga milik pemerintah, karena tidak ada aturan atau dasar hukum yang mengatur dan mengatakan tentang hal tersebut.

Saat ini telah disiapkan rancangan undang-undang tentang didirikannya Universitas Nasional Timor Lorosa'e sebagai Universitas negeri atau pemerintah, dimana sudah selesai dibuat dan telah diserahkan kepada Menteri dan selanjutnya akan dipelajari oleh dewan Menteri untuk disahkannya.

Peraturan tentang Universitas Swasta di Timor Lorosa'e

Di dalam konstitusi pasal 59 ayat 3 juga mengatur tentang tanggung jawab pemerintah untuk menangani pendidikan tinggi, dengan kekuasaan untuk mengatur dan membangun serta mengakui lembaga-lembaga pendidikan swasta. Akan tetapi hingga saat ini pemerintah dalam hal ini departemen pendidikan belum memiliki suatu aturan atau dasar hukum untuk mengatur tentang pendidikan tinggi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh *La'o Hamutuk* dari departemen pendidikan, dalam hal ini dari Director do Ensino Superior, Bapak Justino Guterres bahwa mereka telah membuat dan menyiapkan rancangan mengenai "Aturan bagi perguruan tinggi swasta dan kerja sama atau Estatuto do Ensino Superior e Cooperativo".

Pada bulan Juli 2002, Menteri Pendidikan dan kebudayaan minta kepada Direktur pendidikan tinggi untuk menyiapkan aturan bagi perguruan tinggi swasta dan koperatif untuk mengatur pendirian lembaga-lembaga swasta ini. Departemen terkait telah meninjau rancangan regulasi ini pada bulan Januari tahun 2003, setelah itu rancangan ini akan diusulkan ke dewan menteri untuk dipertimbangkan dan disetujuinya.

Menurut Bapak Justino Guterres bahwa apabila aturan bagi perguruan tinggi swasta dan bersama telah disahkan dan dikeluarkan maka dalam waktu dekat ini pemerintah akan membentuk suatu tim khusus yang akan melakukan tinjauan kesemua perguruan tinggi yang ada saat ini, kemudian mengevaluasi mengenai kondisi ril mereka apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Kriteria untuk sebuah perguruan tinggi yang termuat didalam rancangan aturan bagi perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi bersama adalah sebagai berikut:

- √ Memiliki tempat yang sah dan gedung kampus serta ruang kuliah yang memadai
- √ Memiliki dosen yang cukup dan berkualitas
- √ Memiliki dana yang cukup dan keuangan yang baik
- √ Memiliki perpustakaan
- √ Memiliki laboratorium
- √ Mempunyai pusat informatika
- √ Mempunyai pusat penelitian

Jika ada perguruan tinggi yang dinilai tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka dengan terpaksa perguruan tinggi itu harus ditutup. Dan perguruan tinggi yang memiliki kondisi seperti diatas maka akan diberi akreditasi oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya akreditasi tersebut bisa menjamin mutu atau kualitas perguruan tinggi, dan masyarakat dapat melihat dan menilai perguruan tinggi mana yang memenuhi standar dan memiliki mutu yang baik.

Kesimpulan

Setelah melihat segala keterbatasan perguruan tinggi swasta yang ada tersebut, sesungguhnya terlalu dini dan terburu-buru untuk mendirikan banyak universitas. Universitas-universitas itu sering mengalami kekurangan fasilitas dan sumber daya manusia dan tidak ada dukungan untuk universitas negeri. Universitas negeri yang ada seperti UNATIL harus dibangun atau dikembangkan duluan. Kualitas pendidikan lebih penting dari pada membangun lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk mendapatkan uang bagi para pengurus bisnis-bisnis pribadi atau untuk melayani para pemilih politik tertentu.

Munculnya berbagai lembaga pendidikan tinggi juga menciptakan banyak persoalan karena kekurangan tenaga-tenaga pengajar yang profesional atau terlatih. Ada dosen-dosen yang mengajar di banyak universitas (kami tahu bahwa satu dosen memiliki jam pengajaran part time untuk lima posisi) dan hal semacam ini tidak memberikan perhatian atau bimbingan yang cukup untuk mahasiswanya, tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membuat SP (satuan pengajaran) dan materi pengajaran, mengoreksi tugas-tugas atau bahkan sulit untuk mengajar di kelas.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini departemen pendidikan belum memiliki suatu dasar hukum (undang-undang) yang tertulis dan sah yang mengatur tentang pendidikan tinggi. Pemerintah belum menetapkan sebuah kurikulum yang baku, dan aturan mengenai pemakaian bahasa pengantar resmi dalam proses belajar mengajar di pendidikan formal. Sehingga saat ini perguruan tinggi yang ada tersebut masih mengadopsi sistem pendidikan yang dipakai oleh Indonesia, Portugal dan dari berbagai negara.

Disamping itu juga sejumlah negara tertentu memberikan bantuan dana untuk lembaga-lembaga pendidikan tinggi swasta. Sehingga tanda-tanda liberalisasi dan privatisasi dalam pendidikan pun tampak menjadi suatu fenomena yang mengakibatkan hambatan bagi persiapan sumber daya manusia akan sangat jelas dirasakan di masa mendatang. Apalagi Timor Lorosa'e adalah sebuah negara kecil dengan penduduk yang relatif sedikit dengan kemampuan ekonomi yang boleh dibilang belum terbentuk.

Dari kesemuanya ini, harapan kita adalah perguruan tinggi yang ada jangan sampai hanya sebatas nama saja, akan tetapi benar-benar melaksanakan civitas akademika dan menyiapkan sumber daya manusia untuk bisa membangun bangsa Timor Lorosa'e. Selain itu pendidikan merupakan hak utama, dan kita mengharapkan lembaga-lembaga perguruan tinggi tidak digunakan sebagai komoditi yang bisa dijual-belikan. Ada beberapa lembaga pendidikan tinggi yang tidak mempunyai sumber dana yang tetap dan hal ini bisa mengakibatkan ditutupnya lembaga itu karena kekurangan uang yang juga bisa menyebabkan persoalan bagi mahasiswa dan orang tua mereka.

Apabila semua ini tidak diperhatikan maka akibatnya adalah perguruan tinggi yang ada sekarang akan mengalami kesulitan dan nantinya para mahasiswa akan kenakan beban yang berat karena harus membayar iuran yang mahal demi kualitas pendidikan yang bisa dipertanyakan itu.

Pada bagian lain mungkin saja universitas-universitas yang ada sekarang bisa bubar karena kesulitan dana. Bila hal ini terjadi maka mahasiswa dan para orang tua yang akan tetap dirugikan. ❖

Siapa itu La'ó Hamutuk?

Staf La'ó Hamutuk: Cassia Bechara, Simon Foster, Mericio (Akara) Juvinal, Yasinta Lujina, Inês Martins, Adriano do Nascimento, Charles Scheiner, João Sarmento, Jesuina (Delly) Soares Cabral, Andrew de Sousa

Gambar: Cipriano Daus

Penerjemah: Tomé Xavier Jeronimo

Dewan Penasehat: Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno "Cailoro" Rodrigues, Aderito de Jesus Soares

Berita Singkat...

Pada 1 Januari 2003, **Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) dan Pemerintah Indonesia menca- but status pengungsi internasional bagi warga Timor Lorosa'e yang tinggal di Timor Barat dan tempat-tempat lainnya di Indonesia.** Dampak langsung yang kasat mata dari keputusan UNHCR tersebut ialah diakhirnya dukungan transportasi dari UNHCR dan IOM bagi pengungsi yang kembali ke Timor Lorosa'e. UNHCR memperkirakan 30.000 orang masih menetap di dalam kamp-kamp, dan ditaksir 1.000 anak Timor Leste dipisahkan dari orang tua dan kerabat mereka, yang sebagian besar masih berada di bawah tanggungjawab kelompok-kelompok pro-otonomi di Indonesia. Dewasa ini pemerintah Indonesia tengah menganggap para pengungsi sebagai warga Negara Indonesia, dan bersama dengan UNHCR tengah mengidentifikasi tempat-tempat penampungan, yang sebagian besar berada di Timor Barat dan pulau-pulau dekat lainnya di dalam propinsi NTT, bagi masyarakat Timor Lorosa'e yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsi. Menurut temuan-temuan awal dari sejumlah LSM yang berkecimpung di wilayah ini, sebagian besar tempat tersebut sangat jauh dan menawarkan lahan pertaniannya kurang, serta disangsikan apakah warga Timor Lorosa'e akan menetap di daerah-daerah lain di pulau-pulau lainnya dan sejauh mana tetangga mereka yang baru bersedia menerima mereka.

(Untuk informasi lebih banyak mengenai situasi pengungsi, lihat *Buletin LH* Vol. 2 No. 4, Vol. 2 No. 6-7, dan Vol. 3 No. 4.)

Encontro doadores ba dala hitu iha loron 9-10 Dezembro iha Hotel Timor organiza husi Banku Mundial ho governu RDTL. Hasoru malu ho nasaun doadores, hodi deskuti kona ba asuntu importante ruma oinsa atu kontinua suporta. Issue nebe mak diskuti iha akuntessimentu konfrensia hotu hare ba prioridade geral hanesan deit. Fokus iha edukasaun nian, saude, agrikultura, dezenvolve timor oan sira nia kapasidade mos evaluasaun.

Nasaun Timor Lorosa'e sai papel importante iha nasaun doadores sira nia liman, wainhira Timor Lorosa'e hahu atu hari mesak nia nasaun. Hasoru problemas oi-oin tan hakarak atu libre husi Indonesia nia ukupasaun, to'o pontu ikus Nasaun ne'e hetan nia susesu. Militar Indonesia ho Milisia Timor oan sira nebe organiza husi Indonesia komesa estraga ema no sasan hotu.

Husi ne'e nasaun doadores sira komesa hakfodak no kuinese Timor Lorosa'e nia istoria no hakarak lolo lima hodi fo tulun. Ho razaun ne'e mak akontese enkontru doadores ho nasaun Timor Lorosa'e primero iha Tokyo fulan Dezembro 1999, Lisboa iha fulan Junho 2000, Brussels iha fulan Dezembro 2000, Canberra iha fulan Junho 2001, Oslo iha fulan Dezembro 2002, Timor Lorosa'e Maio 2002 no Dezembro 2002.

Iha relatorio husi governu kona ba dezenvolvementu iha rai laran katak buat hotu la'o ho diak tebes iha fulan balu liu ba, involve ona sosiadade sivil iha sektore hotu, governu nia programa to'o ona iha distritu hotu, maibe ne'e lalos. Governu presiza koalia lia los, tuir realidade nebe akuntese iha rai laran, labele aumenta buat hirak nebe mak seidauk realiza iha rai laran. ❖

Dengarkan Program Radio La'o Hamutuk

La'o Hamutuk mempunyai program radio dengan nama "Programa Iqualityade" yang disiarkan pada tiga stasiun radio yakni:

- ✓ **Radio Timor Kmanek (RTK)** diudarkan pada hari Kamis mulai jam 6-7 sore
- ✓ **Radio Rakambia** diudarkan pada hari Jumad mulai jam 3-4 sore
- ✓ **Radio Timor Lorosa'e** diudarkan pada hari Sabtu jam 11-12 siang



Programa Iqualityade akan menyajikan berita, wawancara dan interaktif (di radio RTK) melalui telepon dalam bahasa Tetum dan Indonesia selama satu jam dengan ahli-ahli dan nara sumber dibidangnya masing-masing sesuai dengan area investigasi *La'o Hamutuk*.

Editorial: Jangan Perang Melawan Iraq! (sambungan dari halaman 20)

Pemerintah Amerika Serikat (dengan dukungan Inggris dan Australia) sedang memimpin perang ini melawan Iraq. Ketiga pemerintah ini juga telah membantu Timor Lorosa'e menjadi sebuah negara merdeka sejak tahun 1999, akan tetapi dari tahun 1975 sampai tahun 1999, mereka mendukung pendudukan brutal militer Indonesia di negara kami dengan memberikan persenjataan dan pelatihan kepada tentara Indonesia agar mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk membunuh dan menyiksa masyarakat kami. Kami bisa melihat prinsip-prinsip yang tidak bermoral dalam usaha-usaha mereka untuk menggulingkan Saddam Hussein yang bisa berdampak serius terhadap korban masyarakat sipil dan yang lainnya, dimana mereka tidak pernah memikirkan untuk menggulingkan Soeharto yang juga sama brutal seperti Saddam Hussein. Walaupun kami tidak mentolerir kediktatoran Saddam namun kami membagi pemahaman kami dengan orang-orang Amerika, Inggris dan Australia bahwa perang bukanlah jawabannya.

Sejak tahun 1999, PBB telah mengupayakan perdamaian dan pembentukan negara di Timor Lorosa'e, namun demikian *La'o Hamutuk* sering mengkritik kehadirannya yang singkat di Timor Lorosa'e tetapi kami yakin prinsip-prinsip dasar PBB yang mendukung pemerintahan dunia untuk mencari jalan perdamaian agar mengakhiri konflik, ke-tidakadil-an dan bentuk-bentuk ancaman lainnya terhadap perdamaian. PBB secara efektif sedang menangani senjata-senjata bahaya pengurak massal karena itu kami menyeruhkan pemerintah-pemerintah khususnya pemerintah Iraq dan Amerika Serikat agar berkerja sama dengan proses multilateral ini.

Kenyataan menunjukkan bahwa pendudukan sudah dimulai tetapi kami tetap percaya bahwa negosiasi dan kompromi merupakan hal yang paling esensial untuk menjamin perdamaian. Setiap kehidupan seseorang tidak akan bisa digantikan kembali karena itu setiap upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan atau nyawa manusia. Selama tiga tahun belakangan, Amerika Serikat, Inggris dan Australia telah menyumbangkan kontribusi-kontribusi yang sangat bernilai secara damai kepada kemerdekaan dan pembangunan Timor Lorosa'e. Walaupun dukungan dan bantuan mereka tidak bisa menghapus keterlibatan mereka dalam mendukung pendudukan illegal Indonesia, tetapi bantuan mereka sangat diharapkan. Dukungan damai dari negara-negara tersebut dalam rekonstruksi dan demokrasi di Iraq sangat diharapkan meskipun negara-negara yang sama sangat senang menjual senjatanya kepada Saddam Hussein dan membeli minyak darinya selama beberapa dasawarsa.

Setelah Iraq menginvasi dan menduduki Kuwait pada tahun 1999, Amerika Serikat dan sekutunya menyerang Iraq, menggagalkan penyerbuan dan menghilangkan nyawa masyarakat sipil Iraq meskipun pada saat yang sama Indonesia sedang menduduki Timor Lorosa'e tetapi Amerika Serikat dan sekutunya merasa tidak perlu untuk melakukan penyerangan terhadap Indonesia di Timor Lorosa'e. Mereka tidak peduli bahwa pendudukan Indonesia telah membunuh masyarakat Timor Lorosa'e yang jumlahnya lebih banyak dari pada Iraq melakukannya di Kuwait yang pada akhirnya aksi non kekerasan yang sangat kuat telah mengakhiri pendudukan itu.

Seperti yang diketahui oleh setiap orang Timor Lorosa'e bahwa penyerbuan dan pendudukan negara ini telah

mengakibatkan banyaknya korban masyarakat sipil. Namun demikian, selama 24 tahun pendudukan baik orang-orang resistensi maupun pemerintah negara-negara asing tidak mengadvokasi penyerbuan Indonesia atau penyerangan masyarakat sipil Indonesia. Kami mengerti bahwa masyarakat Indonesia juga sama seperti kami yang menjadi korban dari Soeharto yang juga tidak diadili atas kejahatannya. Juga sama seperti masyarakat Iraq yang hidup dibawah tekanan Saddam bukan merupakan sebuah ko-konspirator. Penyerangan Iraq juga membunuh masyarakat sipil Iraq yang mana banyak orang yang telah meninggal dunia akibat dari dikenakannya embargo selama bertahun-tahun.

Akhirnya diktator Soeharto dihentikan oleh masyarakat Indonesia melalui perubahan rejim secara damai. Masyarakat Timor Lorosa'e sendiri juga membuat perubahan rejim melalui konsultasi populer. Dari kedua perubahan ini, dukungan internasional lebih banyak diorientasikan pada non kekerasan dan selalu bersifat defensive dan tidak bersasaran pada masyarakat sipil. Demikian pula, keputusan mengenai siapa yang harus memerintah Iraq adalah orang Iraq sendiri yang memutuskannya bukan pemerintah-pemerintah asing meskipun mereka bisa memfasilitasi bantuan non militer apabila masyarakat Iraq memintanya. Tetapi sekarang penyerbuan telah dimulai, atmosfir kerja sama internasional dengan elemen-elemen demokratis Iraq bahkan setelah perang berhenti dan Saddam Hussein tidak berkuasa lagi yang barang kali sudah tidak bisa didapatkan lagi.

Pemerintah Timor Lorosa'e yang baru merdeka, sekarang adalah anggota masyarakat internasional dengan konsekuensi tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam keputusan global. Pada bulan September yang lalu, Timor Lorosa'e meratifikasi Piagam PBB dengan komitmen negara ini untuk mendukung penyelesaian sengketa internasional dengan cara-cara yang damai. Pemerintah Timor Lorosa'e harus menggunakan suaranya dan memilih untuk mendukung melanjutkan usaha-usaha PBB dalam menginspeksi dan melucuti senjata di Iraq, serta menentang aksi-aksi militer dan ekonomi yang dasarnya menghukum orang-orang yang tidak berdosa.

Kami dibuat cemas dengan berbagai pernyataan dan artikel yang ditulis oleh menteri luar negeri José Ramos-Horta dimana dia memuji kebijakan Amerika Serikat dan mendukung kampanye militer pemerintahan Bush untuk menggulingkan pemerintah Iraq. Walaupun penerima Nobel Perdamaian barang kali mengambil hati rezim sekarang yang ada di Washington, tetapi dia sedang menodai tuntutan Timor Lorosa'e untuk menjadi model keadilan, perdamaian dan penentuan nasib sendiri di dunia ini.

Tiga tahun yang lalu, banyak negara termasuk PBB dan juga ketiga negara yang sedang memimpin perang melawan Iraq telah membimbing Timor Lorosa'e pada aturan hukum yang mana melindungi orang yang lemah dari orang-orang yang menggunakan kekuasaan mereka. Aturan hukum ini berlaku untuk semua negara baik negara-negara besar maupun negara kecil. Karena itu, kami tetap menyeruhkan bahwa semua pemerintah untuk menghormati keputusan PBB dan jangan melaksanakan hukum atau perang berdasarkan kehendaknya sendiri. ❖

Editorial: Jangan Perang Melawan Iraq!

Perang antara Amerika Serikat (dengan dukungan yang sedikit) dan Iraq merupakan keprihatinan dunia, karena itu, semua orang yang ada di dunia ini harus menyeruhkan suaranya agar didengar. Walaupun hal ini tidak memberikan dampak langsung bagi Timor Lorosa'e, namun kami percaya bahwa masyarakat Timor Lorosa'e dengan pengalamannya yang mengerikan dan tekanan psikologi yang dialaminya selama perang berlangsung mempunyai



perspektif yang berbeda tentang perang itu sendiri. Lagi pula, hubungan baik kami dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama tiga tahun yang lalu telah menuntun kami bahwa badan dunia ini mempunyai satu peranan yang sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan perdamaian dunia.

Pada tanggal 15 Februari, masyarakat Timor Lorosa'e dan masyarakat internasional melakukan satu demonstrasi di Dili sebagai bagian dari demonstrasi anti perang yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Secara damai kami pun melakukan arak-arakan menuju kedutaan Amerika Serikat, Inggris dan Australia kemudian berbicara dengan duta besar Amerika Serikat dan Inggris untuk Timor Lorosa'e. Meskipun demikian, kami (sebagian besar pemerintah dunia termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa) tidak bisa menyakinkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak menyerang Iraq namun kami tetap percaya bahwa penyerangan yang menjadi tantangan bagi PBB merupakan penyerangan yang tidak beralasan, tidak bermoral dan bersifat criminal.

(Bersambung ke halaman 19)

Apa itu La'o Hamutuk?

La'o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi gabungan Timor Lorosa'e-internasional yang memantau, menganalisis, dan melapor tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosa'e yang efektif. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf *La'o Hamutuk* baik itu staf Timor Lorosa'e maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji dan tunjangan yang sama. Terakhir, *La'o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapkan Anda menghubungi kami jika anda mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapat perhatian rakyat Timor Lorosa'e serta masyarakat internasional.